

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam
(Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar)*

Oleh:

DYAH FITROKHTUL INSANI

NIM: 90100114061

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dyah Fitrokhtul Insani
NIM : 90100114061
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 12 Maret 1995
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Muhajirin Lrg. 3 Makassar
Judul Skripsi : Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka penelitian dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gowa, November 2019 Yang Menyatakan,

Dyah Fitrokhtul Insani
NIM: 90100114061



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad

Syukur *al-hamdulillah*, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufik-nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Salam dan shalawat tak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad ﷺ. beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi penulis, namun berkat izin dan pertolongan Allah swt. Kemudian bantuan dari berbagai pihak, maka semua kendala tersebut dapat dilalui dengan semangat, ketulusan dan kesabaran. Oleh karena itu, pada kesempatan berharga ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan, M.A., Ph.D. Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Ahmad Efendi, S.E., M.M. dan bapak Akramunnas, SE., M.Si. Masing-masing ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam, atas segala bantuan dan bimbingannya.

4. Ibu Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, SE., M.Comm., selaku pembimbing I dan ibu Emly Nursaidy, SE., ME., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Munaqis I dan Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si. selaku Munaqis II yang telah memberikan arahan, kritik dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan ilmunya tanpa pamri terhadap penulis.
7. Teristimewa kepada Ayahanda Ahmad Zamroni dan Ibunda Yuli Purwiyani tercinta yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, perhatian, motivasi, dukungan serta doa yang tulus dalam keberhasilan penulis sampai sekarang ini.
8. Kepada keluarga besar Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) dan Forum Kajian Ekonomi Syariah (FORKEIS), sebagai tempat penulis dalam berorganisasi.
9. Seluruh rekan-rekan penulis yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu. Bantuan mereka berupa materi dan non materi

sangat mendukung kesuksesan penulis dalam mengikuti studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Hanyalah doa keselamatan dan permohonan rahmat Allah swt., penulis peruntukkan kepada mereka yang telah turut membantu penulis selama ini. Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi segenap pihak, khususnya kepada penulis sendiri.

Samata, November 2019.

Penulis

Dyah Fitrokhtul Insani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15-46
A. Teori <i>Mudharabah</i>	15
B. Teori <i>Musyarakah</i>	26
C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	35
D. Larangan <i>Maishir</i> , <i>Gharar</i> , dan <i>Riba</i>	44
E. Kerangka Konseptual.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	47-58
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian	48
C. Sumber Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	51
E. Instrumen Penelitian	53
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
G. Pengujian Keabsahan Data	56
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	59-104
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	59

B. Implementasi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada BPRS Investama Mega Bakti	67
C. Implementasi Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> pada BPRS Investama Mega Bakti	87
D. Kendala di BPRS Investama Mega Bakti	104
BAB V PENUTUP	105-106
A. Kesimpulan	105
B. Implikasi	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah	25
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah.....	34
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	46
Gambar 4.1 Struktur BPRS Investama Mega Bakti.....	62



ABSTRAK

Nama : Dyah Fitrokhtul Insani

NIM : 90100114061

**JUDUL : IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(STUDI BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar.

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang diperoleh yakni data-data berupa wawancara, observasi, dokumentasi dan data dokumen dari BPRS Investama Mega Bakti, dengan teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, selanjutnya uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian yang menunjukkan implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* belum menunjukkan kesesuaian penerapan sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 7 & 8/DSN/MUI/IV tahun 2000 tentang *mudharabah* dan *musyarakah*, seperti dalam pemantauan usaha nasabah, bagi hasil agar tercapai masalah antara bank dan nasabah, dan kerugian yang harus di tanggung sesuai proposional.

Kata Kunci: Akad, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah atau Bank Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Semua transaksi perbankan syariah melarang adanya MAGHRIB (*Maishir, Gharar, Riba, dan Bathil*) dan diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “*antarodin*” sangat diutamakan untuk menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan.² Seperti halnya firman Allah dalam Q.S An-Nisaa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 42.

² Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang”, *Jurnal Iqtishoduna*, Vol. 5, No. 1, (April 2015),

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syamil Qur'an), h. 83

Kandungan dari ayat tersebut menerangkan hukum transaksi secara umum, Allah mengharamkan orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta orang lain dengan jalan batil, yaitu yang tidak dibenarkan dalam syariat, kita boleh melakukan transaksi dengan orang lain berdasarkan saling ridha dan saling ikhlas satu sama lain.

Secara umum terdapat bentuk usaha bank syariah atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya perhimpunan dana dan penyaluran dana.⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini menjadi sumber penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka, pembiayaan yang diberikan menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu menyalurkan dana melalui beberapa akad meliputi akad yg berbasis jual beli, akad yang berbasis jasa dan akad yang berbasis hasil, akad yang berbasis bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 24.

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 7 tahun 2000 dijelaskan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak untuk suatu usaha tertentu, yaitu salah satu pihak memberikan modal dan lainnya sebagai pengelola usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung secara bersama.⁵ Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁶ Ditinjau pada sisi pembiayaan, *mudharabah* ditetapkan untuk pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus yang disebut juga *mudharabah muqayyadah* yang mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.⁷

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 8 tahun 2000 dijelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu; masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000*.

⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 95.

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, h. 97.

dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proposional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko ditanggung bersama secara proposional.⁸ *Al-Musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek yang mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.⁹

Salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti bertempat di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 26A kota Makassar yang lokasinya sangat strategis. Sistem yang digunakan oleh BPRS Investama Mega Bakti Makassar adalah sistem syariah, dengan mempunyai produk penghimpun dana dan penyaluran dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing.

Penghimpunan dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti melakukan mobilisasi dan investasi tabungan dengan cara yang adil. Produk dalam menghimpun dana yaitu dengan simpanan dan investasi. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Investama Mega Bakti Makassar berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan. sedangkan investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Investama Mega Bakti Makassar berdasarkan akad *mudharabah* dalam bentuk deposito. Penyaluran

⁸ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 82-83.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, h. 93.

dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam enam kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan multijasa.

BPRS Investama Mega Bakti Makassar benar-benar selektif dalam menentukan nasabah pembiayaan dan usaha yang dibiayai. Untuk itu setiap pengajuan pembiayaan pasti dilakukan survey, analisa serta dibentuk komite berjenjang, sehingga hasil keputusan akan lebih tepat sasaran. Salah satu bentuk kesesuaian penerapan implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BPRS dengan melihat aspek perkembangan kinerja operasionalnya, semakin berkembangnya kinerja operasional di suatu BPRS maka semakin baik pula pembiayaan di BPRS tersebut.

Paradigma yang telah terbentuk di kalangan masyarakat bahwa implementasi pembiayaan pada bank konvensional dan di bank syariah tidak memiliki perbedaan yang signifikan, mereka menganggap bahwa bagi hasil dari segi konsep pengembalian modal pembiayaan sama dengan bunga, serta prosedur pembiayaanpun lebih mudah di bank konvensional dibandingkan di bank syariah.¹⁰ Hal ini diperkuat lagi dengan adanya contoh dari penelitian di BPRS PNM Al-Ma'soem Bandung,

¹⁰ Anang Kusuma, *Opini Masyarakat Tentang Bank Syariah, Media Online* (19 Desember 2016) <http://www.kompasiana.com> (Di akses tanggal 1 Maret 2019).

menurut keterangan hasil wawancara peneliti dengan salah satu marketing BPRS PNM Al-Ma'soem yang mengatakan bahwa metode bagi hasil yang digunakan pada produk pembiayaannya dengan cara *flat*, artinya nasabah harus membayar angsuran bagi hasil setiap bulannya dengan jumlah yang tetap yang sudah di proyeksikan sebelum kerjasama itu terjadi dengan menganalisis terlebih dahulu kemungkinan kemungkinan penghasilan yang diperoleh nasabah dari hasil usahanya tersebut, seharusnya nasabah membayar hasil usaha sesuai dengan keadaan usaha yang di jalankan tetapi kenyataannya bank menetapkan keuntungan di awal.¹¹

Menurut penulis contoh kasus tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No; 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan yang menjelaskan bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, dan teori bagi hasil itu sendiri yang menyatakan bahwa bagi hasil harus sesuai dengan pendapatan atau keuntungan *riil* yang benar-benar terjadi pada usaha yang sedang dijalankan.

Hal tersebut membuat peneliti ingin mengetahui secara mendalam implementasi akad pembiayaan dari awal prosedur pembiayaan hingga proses pengembalian modal di bank syariah, serta berakhirnya akad kerjasama usaha antara pihak bank dan nasabah, selanjutnya mampukah dalam hal ini BPRS Inestama

¹¹ Mukhwan Hariri, "Pelaksana Produk Pembiayaan Modal Usaha *Advertising* Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS Al-Ma'soem Rancaekek Bandung", *Skripsi*, (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2013), h. 8.

Mega Bakti merealisasikan sistem dan konsep produknya sesuai syariah, serta dapatkah menumbuhkan rasa kepercayaan dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Implementasi pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh BPRS Investama Mega Bakti Makassar, oleh karena itu penulis mengambil judul “Implementasi Akad Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar)”.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti memfokuskan penelitiannya tentang sejauh mana kesesuaian pembiayaan syariah dalam penerapan akad pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Menghindari adanya kesalahan penafsiran pembaca terhadap penelitian ini, maka peneliti memberikan fokus pemaknaan yang lebih rinci agar tidak memunculkan penafsiran yang bermakna ganda. Peneliti memberikan batasan judul dalam bentuk deskripsi fokus dengan menyederhanakan pemaknaan.

Deskripsi fokus penelitian ini tentang penerapan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar terhadap

kesesuaian prinsip syariah. Pada pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip syariah yaitu terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, yang pertama pihak *shahibul maal* (pemilik modal) dalam hal ini adalah bank dan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) dalam hal ini nasabah, kedua belah pihak ini melakukan kerjasama usaha tertentu. *Shahibul maal* memberikan 100% modal kepada *mudharib* untuk mengelola usaha tersebut selanjutnya pendapatan dari hasil pengelolaan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara kedua belah pihak dan modal 100% kembali kepada *shahibul maal*, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib* maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh kedua belah pihak.

Pada pembiayaan *musyarakah* bank syariah sebagai *shahibul maal* pertama, dan nasabah sebagai *shahibul maal* kedua sekaligus menjadi pengelola modal menandatangani akad pembiayaan *musyarakah* dalam suatu proyek tertentu. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah dan dapat dibantu oleh pihak bank, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha. Hasil usaha atas kerjasama tersebut akan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan dalam akad. Jika terjadi kerugian bank syariah dan nasabah bersama-sama menanggung kerugian tersebut, setelah kontrak berakhir maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja sesuai kontribusi dana masing-masing pihak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar ?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan akad *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis, hal terkait pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bukan hal baru lagi dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penulis memberikan gambaran beberapa karya atau penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, antara lain :

1. Penelitian terkait dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diantaranya adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 yaitu penelitian oleh Muhammad Khoirul Ridwan yang berjudul Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta. Penulis menjelaskan bahwa BPRS Dana Sejahtera Yogyakarta menerapkan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C-2A (*Character, Capacity, Collateral,*

Condition + Analisis Syariah dan Analisis Resiko) dan dalam bagi hasilnya menggunakan prinsip *revenue sharing*.¹²

2. Jurnal penelitian Bambang Waluyo yang membahas mengenai “Implementasi *Mudharabah* pada pembiayaan di Bank Syariah”, Menurut jurnal tersebut implementasi *mudharabah* di bank syariah menggunakan *transfer risk*, yang mana bank tidak berbagi keuntungan lebih ideal jika bagi hasilnya dengan berbagi kerugian dengan nasabah yang mengambil pembiayaan di bank syariah. Hal ini dikarenakan *profit loss sharing* memiliki risiko inheren pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi, dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko. Di dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional.¹³
3. Jurnal Penelitian Ibrahim Fajri dkk yang membahas mengenai Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjamin Syariah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam penyusunan perjanjian (kontrak-kontrak) kegiatan transaksi di lembaga Penjamin Syariah mengacu sepenuhnya pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan Menteri Keuangan

¹² Muhammad Khoirul Ridwan, “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta “, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 100. digilib.uin-suka.ac.id (Di akses tanggal 01 Maret 2019)

¹³ Bambang Waluyo, “Implementasi *Mudharabah* pada Pembiayaan di Bank Syariah”. *Jurna; Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2016), h. 193. <http://e-journal.unair.ac.id> (Di akses tanggal 01 Maret 2019)

(PMK), Peraturan Menteri Agama (PMA). Temuan menunjukkan bahwa akad-akad dilaksanakan masih belum sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang berlaku.¹⁴

4. Jurnal Penelitian Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi yang membahas mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Bank Syariah yang di Hubungkkn dengan Pasal 1338 KUH Perdata, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* pada bank syariah didasarkan pada pola kemitraan, yaitu terdapat kesepakatan antara pihak bank syariah sebagai *shahibul maal* dengan nasabah sebagai *mudharib*, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yaitu keduanya berpotensi menimbulkan sanksi yang dapat dipaksakan bagi pihak yang tidak mentaatinya.¹⁵
5. Penelitian Arvi Sri Utami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2017 yang berjudul Implementasi dana Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* untuk Peningkatan Usaha Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil Berkah Trenggalek*. Penulis menjelaskan bahwa implementasi pembiayaan *musyarakah* di BMT Berkah Trenggalek sudah sesuai dengan Fatwa DSN-

¹⁴ Ibrahim Fajri dkk, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjamin Syariah", *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, NO. 2, (September 2017). h. 28. <http://ejournal-uika-bpgpr.ac.id> (Di akses tanggal 01 Maret 2019)

¹⁵ Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Pasi 1338 KUH Perdata", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (2017), h. 433. <http://proceeding.unisba.ac.id> (Di akses tanggal 01 Maret 2019).

MUI, No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*. BMT Berkah Trenggalek menggunakan metode *profit loss sharing* dalam menghitung bagi hasil pada pembiayaan musyarakah dalam perhitungan hasil menggunakan nisbah bagi hasil. Kedua belah pihak memperoleh bagian bagi hasil menggunakan nisbah bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh anggota, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Kontribusi dari pembiayaan *musayarakah* yang digunakan untuk peningkatan usaha di BMT Berkah menunjukkan adanya peningkatan perekonomian masyarakat (sebagai anggota) maupun masyarakat umum, karena dengan adanya pembiayaan *musyarakah* usaha beberapa anggota BMT Berkah Trenggalek dapat berjalan dengan lancar sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat sekitar.¹⁶

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu, sama-sama meneliti tentang implementasi akad pembiayaan syariah yang berlaku, metode pengumpulan data sama-sama menggunakan metode wawancara kepada nasabah dan pihak bank. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini ialah perbedaan tempat, waktu dan kondisi yang berbeda antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini, pada penelitian Ibrahim Fajri dkk membahas lebih

¹⁶ Arvi Sri Utami, "Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek", *Skripsi* (Tulung Agung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, 2017), h. 129. Repo.iain-tulungagung.ac.id (Di akses tanggal 01 Maret 2019)

dalam mengenai prinsip-prinsip syariah dalam kontrak perjanjian syariah sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas mengenai akad yang teraplikasikan di bank pembiayaan syariah.

Pada penelitian Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi membahas mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* pada Bank Syariah di Hubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata sedangkan peneliti saat ini menghubungkan akad pembiayaan dengan kesesuaian syariah yang semestinya. Selanjutnya pada penelitian Arvi Sri Utami yang berjudul Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* untuk Peningkatan Usaha Nasabah, penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kontribusi *musyarakah* untuk peningkatan usaha para nasabah sedangkan dalam penelitian saat ini tidak membahas kontribusi peningkatan usaha nasabah.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi akad pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
2. Mengetahui implementasi akad pembiayaan *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Ilmiah

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang implementasi pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* serta penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi penulis-penulis lainnya.

2. Kegunaan Praktisi

Diharapkan dapat menjadi informasi bagi Bank Pembiayaan Syariah Investama Mega Bakti Makassar yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan di BPRS Investama Mega Bakti Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna. Secara etimologi, *mudharabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, atau bepergian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa 4/101 :

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ...

Terjemahanya :

Dan apabila kamu bepergian ke muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqhasar sembahyang(mu)...¹⁷

Secara terminology mudharabah adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktifitas yang produktif yang mana keuntungan dibagi kedua belah pihak antara modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.¹⁸ Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak (orang) saling

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 95

¹⁸ Mardani *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 195.

menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya dan pihak satu sebagai pengelola.¹⁹

Menurut Abdurrahman Al-jaziri dalam bukunya yang berjudul “Fiqh ‘Ala Madzhahib al-Arba’ah”, menjelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad antara dua orang yang berisi kesepakatan bahwa salah seorang dari mereka akan memberikan modal usaha produktif dan keuntungan usaha itu diberikan sebagian kepada pemilik modal dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan yang sudah disetujui bersama.²⁰

Menurut pengertian istilah fiqh *al-mudharabah* adalah sebagai berikut:²¹

a. Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

b. Mazhab Syafi’i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya diberi antara mereka berdua.

c. Mazhab Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknaanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkannya bagian tertentu dari keuntungannya.

¹⁹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 135-136,

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, “*Fiqh Madzhah al-Arba;ah*” Juz III, (Beirut: Dar al-Qalam, tt), h.

²¹ Muhammad, “*Teknik Bagi Hasil Keuntungan pad Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 37.

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara (*mudharabah*) dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal maka kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan nasabah sebagai *mudharib* (pengelola) untuk melaksanakan kegiatan usaha, yang mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

2. Landasan hukum pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.

a. Al-Qur'an

Q.S Al- Muzammil/ 73 : 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Terjemahannya :

... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi ini mencari sebagian karunia

Allah...²²

Berdasarkan penggalan ayat tersebut yang menjadi *wajhud dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil ayat 20 adalah kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha. Allah memerintahkan ummatnya untuk melakukan suatu usaha di dunia dengan mengharap karunia Allah dengan cara yang baik dan benar.

Q.S Al-Jumu'ah/ 62 : 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah...²³

Q.S Al-Baqarah/ 2 : 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya :

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²⁴

Berdasarkan penggalan surah al-Jumu'ah ayat 10 dan al-Baqarah ayat 198 menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan ummatnya untuk sama-sama

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 575.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 554.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

mendorong kaum muslimin melakukan perjalanan usaha di muka bumi dengan mengharap rezeki yang di karuniakan Allah untuk ummatnya yang mau berusaha mencari penghidupan yang layak. Salah satu usaha ialah berniaga dengan cara yang halal.

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ»²⁵
Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat barakah ; jual beli yang memberi tempo, meminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.”²⁵

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa praktek *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dengan melakukan jual beli yang memberi tempo pembayaran sesuai kesepakatan, meminjaman dengan tidak memberikan syarat pengembalian yang dapat dihitung riba, dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan didalamnya karena dapat meringankan beban sesama ummat manusia.

3. Jenis-jenis pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:²⁶

a. *Mudharabah Muthlaqah*

²⁵ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Musnad Ibn Majah*, Juz II, (Cet: I; Arab), h. 768

²⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 97.

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah berbisnis. Menurut pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. *Mudharabah Muqayyadh*

Mudharabah Muqayyadh atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharabah* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

4. Ketentuan, Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan, *mudharabah* dikemukakan hal-hal yang menjadi ketentuan, rukun dan syarat dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

a. Ketentuan pembiayaan²⁷

- 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah ke pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

- 2) LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (pelaku) berperan sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pergantian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) *Mudharib* dapat melakukan berbagai macam usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak serta dalam manajemen perusahaan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana yang harus dikeluarkan dengan jelas dalam bentuk uang dan bukan utang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana untuk menyelesaikan masalah dari *mudharabah* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan atau menentang terhadap hal-hal yang telah disetujui bersama dalam akad.
- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pengeluaran, dan alokasi pembagian diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) *Mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

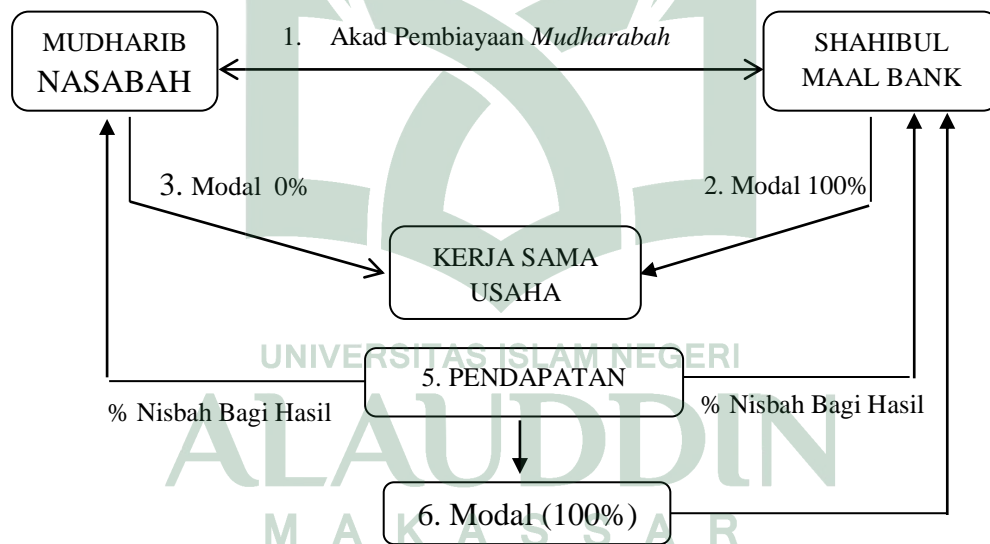
b. Rukun dan syarat Pembiayaan²⁸

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara resmi menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - c) Modal atas jumlah uang dan/ atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai (jika modal diberikan dalam bentuk aset tersebut harus dinilai pada waktu akad).
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad,
- 3) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

²⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 134-135.

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase/nisbah (perubahan nisabah harus berdasarkan kesepakatan).
- 4) Penyedia dana menanggung semua kegiatan atas usaha yang dikelola oleh *mudharib*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.
- 5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dan juga harus memerhatikan :
 - a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* penyedia dana tidak berhak melakukan intervensi. Akan tetapi, ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) atau usaha yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
 - b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharib*, yaitu keuntungan.
 - c) Pengelola tidak boleh meyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah* dan harus mematuhi kebijaksanaan yang berlaku dalam aktivitas itu.
- c. Ketentuan lain:
 - 1) *Mudharabah* dapat dibatalkan pada periode tertentu.

- 2) Kontrak tidak dapat dibatalkan (*mu'allaq*) dengan kejadian di masa depan yang belum terjadi.
- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi karena pada dasarnya akad ini amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan sengaja, kelalaian, atau dipertanyakan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak kedua, maka diselesaikannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak disetujui melalui musyawarah.
5. Skema Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan :

- a. Bank Syariah (*shahibul maal*) dan nasabah *mudharib* menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.

- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*. Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Presentase tertentu menjadi hak bank syariah dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.

B. Teori Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa *Musyarakah* berasal dari kata *al-syirka* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²⁹ Secara etimologi, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *Partnership*.³⁰

²⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

³⁰Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 142.

Menurut Ascaraya dalam bukunya yang berjudul Akad dan Produk Bank Syariah mengatakan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha memiliki dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha memiliki modal berkat ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan para pihak dapat membagi pekerjaan pengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.³¹

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (*Syirkah syar'iyah*) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. kemudian modal bersama dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besar modalnya tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, meskipun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Menurut kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.³²

³¹ Ascaraya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 51.

³² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 96

Al-musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, yang mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan berasam. *Musyarakah* disebut juga dengan syirkah merupakan aktivitas berserikat alam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.³³

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

Q.S Sad/38 : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

...

Terjemahnya:

dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh;³⁴

Berdasarkan pengertian *al-syirkat* tersebut dapat kita simpulkan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian di tanggung bersama sesuai kesepakatan, namun demikian modal tidak selalu berbentuk uang tapi dapat berbentuk barang yang dapat di taksir jumlah nilai barang tersebut.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 176.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 454.

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishhishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibrigan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia marefa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: “ Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.³⁵

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa di dalam hadis tersebut mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

³⁵Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyir bin syadad, Musnad Abu dawud, Juz III, Cet: I; Beirut: al-Maktabatul Ashrih), h. 256.

3. Jenis-jenis pembiayaan *musyarakah*

Menurut syariah Islam, *syirkah* atau *musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu:³⁶

- a) *Syirkah Al-Milk*, dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang bersekat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi. *Syirkah al Milk* biasanya berasal dari warisan atas barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.
- b) *Syirkah Al-Uqud*, (*contractual Partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. *Syirkah Al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi. *Syirkah Al-Uqud* dibagi menjadi empat jenis yaitu:

(1) *Syirkah Mufawwadah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi

³⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 146.

hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. *Syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

(2) *Syirkah A'maal*

Syirkah A'maal disebut juga dengan *syirkah abdan*. *Syirkah A'maal* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitra usaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. *Syirkah A'maal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya ialah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam *Syirkah A'maal* akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara pihak yang bermitra.

(3) *Syirkah Wujuh*

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis perserikatan ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar jaminan tersebut. Karenanya, akad ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*.

(4) *Syirkah Inaan*

Merupakan akad kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua

pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka. Mayoritas ulama membolehkan jenis *al-musyarakah* ini.

4. Ketentuan, Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/akad dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti melalui telepon atau internet.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum dengan memerhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

³⁷Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasardan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 137-139.

- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra harus memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memerhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
1. Modal,
 - a) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas dan perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.
 2. Kerja

- a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3. Keuntungan/Kerugian

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghadapi perbedaan dan sengkata pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dari *musyarakah* secara bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5. Skema Pembiayaan Musyarakah

Skema 2.2 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Pada pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Keterangan skema:

1. Bank syariah (*shahibul maal* 1) dan nasabah (*shahibul maal* 2) menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.

2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah.
3. Nasabah menyerahkan dana 30% dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha.
5. Hasil usaha atau kerjasama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal ini apabila terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30% .setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Pengertian Bank Pembiayaan Syariah

Sebelum lahirnya BPR Syariah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya. Maka dari itu, harus dibedakan antara BPR konvensional dan BPR Syariah. Perbedaan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:³⁸

a. Akad dan aspek legalitas

BPR Syariah mempunyai akad yang dilakukan dengan konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sering nasabah berani melanggar kesepakatan atau perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif.

b. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya yang bertujuan mengawasi praktik operasional BPR Syariah agar tidak menyimpang dari prinsip Syariah.

c. Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah maupun Pengadilan Agama.

d. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, syubhat ataupun menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.

e. Praktik operasional BPR Syariah, baik untuk penghimpunan maupun penyaluran pembiayaan, menggunakan sistem bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayar. Bentuk hukumnya dapat berupa : Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau perusahaan daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004). Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank

³⁸ Muhammad, “*Manajemen Bank Syariah*”, (Yogyakarta: UPP AMP, 2002), h. 56.

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁹

Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah telah mengatur secara khusus eksistensi Bank Syariah di Indonesia, Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang belum spesifik sehingga perlu diatur khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Menurut Pasal 18 UU No. 21 Tahun 2008. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁰

2. Tujuan dan Karakteristik BPR Syariah

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syariah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.

³⁹ Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 41.

⁴⁰ Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, h. 3

⁴¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teori ke Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 199.

- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup memadai.
- d. Untuk mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor *riil* akan bergairah.

Strategi operasional untuk mencapai tujuan BPRS, yaitu:⁴²

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis baik.
- b. BPRS Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah kecil.
- c. BPR Syariah mengkaji pangsa pasar, tingkat kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.

Aktivitas operasional perbankanya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang.⁴³

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

⁴² M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teori ke Praktik*, h. 200

⁴³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teori ke Praktis*, h. 200.

- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syariah.
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- f. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

3. Kegiatan Usaha BPR Syariah

Kegiatan usaha dari BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa, yang membedakannya adalah bahwa BPR Syariah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menerbitkan giro.⁴⁴

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syariah versi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:⁴⁵

⁴⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 41.

⁴⁵ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h. 53-54.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ahi* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
 - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*
 - 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*
 - 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
 - 5) Pengambilan alihan utang berdasarkan akad *hawaliahi*.
- c. Menempatkan dana pada Bank Syariah dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d. Memindahkan *using*, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah rekening Bank Pembiayaan Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum konvensional, dan Unit Usaha Syariah.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

4. Pembiayaan di BPR Syariah

a. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴⁶ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan lain berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa :

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa-beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- 3) Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 4) Transaksi pinjam- meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

⁴⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", h. 160.

⁴⁷ Romawati Kusumaningtias, "*Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-12*", *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol. 2 No. 4 Oktober 2014 <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> (di akses pada tanggal 22 Februari 2019).

dan/atau diberi fasilitas dan untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

b. Pelaksanaan pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi:⁴⁸

- 1) Aspek Syariah, yakni dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur *maishir*, *gharar*, dan *riba* serta usahanya harus halal).
- 2) Aspek ekonomi, yakni disamping mempertimbangkan hal-hal Syariah, Bank Syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi Bank Syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

c. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Peningkatan ekonomi umat
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- 3) Meningkatkan produktifitas
- 4) Membuka lapangan kerja baru
- 5) Terjadi distribusi pendapatan

d. Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 16.

⁴⁹ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), h. 20.

⁵⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 160.

kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan, pembiayaan ini diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu:⁵¹

- 1) Pembiayaan menurut tujuan, yaitu:
 - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha
 - b) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu:
 - a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

⁵¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, h. 22.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *musyarakah*
 - b) Pembiayaan *mudharabah*
- 2) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli (piutang), untuk jenis pembiayaan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *murabahah*
 - b) Pembiayaan *salam*
 - c) Pembiayaan *istishna*
- 3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
 - a) Pembiayaan *ijarah*
 - b) Pembiayaan *ijarah muntahiya nittamluk/wa iqtina*.

D. Larangan Maishir, Gharar, dan Riba

Keseimbangan berperan penting dalam aktivitas ekonomi, yang mana sifat keadilan ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Berikut ialah penjelasan tentang beberapa unsur yang dilarang dalam aturan prinsip interaksi

maupun transaksi dalam ekonomi Islam.⁵²

1. *Maishir*

Secara etimologi *maishir* semakna dengan *qimar* yang berarti judi, yaitu segala bentuk perbuatan yang bersifat untung-untungan atau spekulatif yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan materi. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *maishir* sebagai transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti atau bersifat untung-untungan. Islam sangat melarang segala bentuk perjudian karena banyak mendatangkan kemudharatan

2. *Gharar*

Secara etimologi *gharar* berarti bahaya atau resiko, dari kata *gharar* juga terbentuk kata *taghrir* yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Menurut istilah *fiqh muamalah*, *gharar* adalah terkait dengan adanya ketidakjelasan sesuatu dalam melakukan transaksi, dalam interaksi sosial maupun transaksi finansial *gharar* dapat mengambil bentuk adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan pihak lain.

3. *Riba*

Secara etimologi *riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh. Menurut Al-Syirbashi mendefinisikan *riba* dengan kelebihan atau tambahan pembayaran atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang

⁵² Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h. 79

melakukan transaksi (berakad). Islam melarang *riba* dengan segala bentuknya, karena uang bukanlah sebagai barang komoditas. Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrument penting dalam praktik bisnis *riba* yang diharamkan dalam sistem keuangan syariah.

E. Kerangka Konseptual

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi sumber penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi pengembangan usaha-usaha masyarakat golongan ekonomi lemah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu menyalurkan dana melalui beberapa akad meliputi akad yang berbasis jual beli, akad berbasis jasa, dan akad yang berbasis bagi hasil. Akad yang berbasis bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Masing-masing akad tersebut merupakan bentuk/jenis pembiayaan untuk kerjasama usaha antara *mudharib* (pengelola modal/nasabah) dengan *shahibul maal* (pemilik modal/bank). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BPRS Investama Mega Bakti dengan membuktikan apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya maka peneliti membuat kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 2.3 Kerangka Konseptual

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian dalam penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen*, tentang suatu fenomena, kejadian, maupun, kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh. Penelitian dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa, mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.⁵³ Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan.

Penelitian yang bertujuan memahami sebuah fenomena secara apa adanya (khususnya dari perspektif subjek) yang di deskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang terdapat didalamnya.⁵⁴ Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 26A kota

⁵³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenada Media Grup), h. 111.

⁵⁴ David Hizkia Tobing dkk, *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), h. 8.

Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalita. Subjek dari penelitian ini mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subjek.⁵⁵

Pendekatan studi kasus juga biasanya digunakan untuk menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata yang mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas sehingga diperlukan pemanfaatan multi sumber.⁵⁶ Menurut Lincoln dan Guba penggunaan studi kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, yaitu:⁵⁷

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti
2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari,

⁵⁵ Mohammad Nazir, *Merode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 66.

⁵⁶ Robert K. Yin, *Studi Kasus*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2002), h. 18

⁵⁷ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 201.

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden
4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan bagi penilaian atau transferabilitas

Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk mengungkap tentang implelementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pemilihan metode ini dialami pada fakta bahwa adanya sistem *flat* dalam pembiayaan syariah yang tercantum pada latar belakang penelitian ini.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan asal usul data tersebut diperoleh. Apabila peneliti di dalam mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner, maka sumber data disebut responden. Jadi, pengertian sumber data ialah subjek atau objek penelitian yang darinya akan diperoleh data.

Jenis sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, dalam hal ini wawancara dengan pihak BPRS Investama Mega Bakti tentang implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* dalam proses transaksi pembiayaan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah hasil peneliti baik berupa fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan yang dimaksud sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh, lewat dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya buku-buku, artikel, dan karya ilmiah.⁵⁸ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam buku dan dokumen.

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan: Edisi Revisi V*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dalam lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesign cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjaga, karena nantinya akan diputar kembali dan didengar berkali-kali untuk dianalisis.⁵⁹

⁵⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Grasindo), h. 112

2. Interview atau Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses yang dilakukan agar memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.⁶⁰ Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu pihak bank dan nasabah pada BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual, adakalanya juga secara kelompok, wawancara ini digunakan apabila ingin mengetahui lebih dalam terhadap objek penelitian. Untuk melakukan teknik tersebut dilakukan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan kepada responden.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan, dokumen pribadi dan

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, h. 111.

dokumen resmi.⁶¹

4. *Internet Searching*

Selain melalui studi pustaka, peneliti juga menggunakan internet sebagai bahan acuan yang mendukung kelengkapan referensi penulis dalam menemukan fakta atau teori yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.

E. *Instrumen Penelitian*

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dan sebagai unsur penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian. Kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. Instrumen penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan penelitian dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti itu sendiri
2. Pedoman wawancara
3. Alat tulis (pulpen, buku)

⁶¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 255.

4. Handphone untuk merekam pada saat wawancara dan kameranya untuk mendokumentasikan penelitian.
5. Buku, jurnal, dan referensi lainnya yang terkait pada judul penelitian

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori yang disarankan oleh data. Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, foto dan sebagainya.⁶² Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

⁶² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 103.

dicari tema dan polanya.⁶³ Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kegiatan reduksi data antara lain: a) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; b) mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.⁶⁴ Penyajian data dilakukan dengan tujuan mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif, dan di dukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakannya suatu kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data dan mencari pola, tema, hubungan

⁶³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaceta, 2009), h. 92.

⁶⁴ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kealitatif dengan NVIVO*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.

persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan pelaksanaan teknik didasarkan sejumlah kriteria tertentu.⁶⁵ Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data dan informasi yang akurat, maka cara yang tepat digunakan adalah menggunakan metode triangulasi.

Triangulasi sendiri menurut Norman K. Denkin adalah gaungan atau kombinasi berbagai metode yang di pakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Teknik triangulasi yaitu informan yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan interview menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.⁶⁶ Sedangkan menurut Meleong adalah teknik pemeriksaan kabsahan data yang memanfaatkan

⁶⁵ Neuman W. Lawrence, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Keuantitatif Edisi 7*, Penerjemah: Edina T. Sofia, (Jakarta: PT Indeks, 2013), h. 14-15.

⁶⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, h. 23.

sesuatu yang lain, diluar dari data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data tersebut.⁶⁷ Menurut Sugiyono triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yakni sebagai berikut:⁶⁸

1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap yang benar, atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber tersebut.

⁶⁷ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, h. 369.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berarti waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus juga sesuaikan dengan kondisi narasumbernya. Pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukannya secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Penelitian ini menggunakan keabsahan data yaitu pada triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pada triangulasi teknik, pengumpulan data peneliti akan mengumpulkan hasil wawancara yang mana informasi dari berbagai subjek, seperti pihak BPRS dan masyarakat yang menjadi nasabah BPRS. Sedangkan pada triangulasi sumber, peneliti akan membahas tentang implementasi akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang sesuai dengan konsep syariah pada injauan teoretis yang telah di bahas pada bab II.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPRS Investama Mega Bakti

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Investama Mega Bakti yang berkedudukan di kota Makassar sebelumnya bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ittihad, pertama kali didirikan dengan akta notaris nomor 01 tanggal 01 Januari 2001 dihadapan Andi Hasna Beddu, SH. Notaris di Sengkang telah diubah berdasarkan akta notaris Andi Hasna Beddu, SH. No.05.

Pada tanggal 19 Januari 2002 melakukan perubahan nama menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ittihad berdasarkan akta notaris Brilian Thoris, SH. No.11, notaris di Makassar yang keduanya telah memperoleh pengasahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan tertanggal 08 Januari 2002 Nomor C-0216HT.01.01.TH.2001, serta selanjutnya memperoleh izin usaha dari Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 4/18/KEP.DpG/2002 tanggal 26 April 2002 dengan nama PT. BPR Syariah Al-Ittihad.

Anggaran dasar perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yakni pada tanggal 28 Agustus 2008 dilakukan akuisisi berdasarkan akta notaris Darul Adam, SH. No.10, yang sebelumnya dilakukan jual beli saham dengan akta yang sama dengan No.08 dan 09. Menyusul pada tanggal 28 November 2008 pihak perseroan melakukan rapat umum pemegang saham luar biasa dengan mengeluarkan berita acara dihadapan notaris Abdul Muis, SH, MH. No. 235, Notaris Makassar.

Berita Acara tersebut disetujui perubahan nama dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Ittihad menjadi PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti. Persetujuan mengeluarkan saham dan persetujuan mengadakan perubahan atas seluruh Anggaran Dasar dan diperkuat dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-20855. AH.01.02 tahun 2009 tanggal 14 Mei 2009 serta surat persetujuan Bank Indonesia Makassar Nomor: 11/07. KEP. BI/MKS.2009 tanggal 01 Juni 2009.

Pada tanggal 16 April 2009 dihadapan notaris Abdul Muis, SH.,MH., dengan akta notaris No.123 dan juga pada tanggal 28 Januari 2010 dihadapan notaris Syahrir Madeali, SH. No.226 notaris di Makassar yang berisi persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan juga perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisari.

Pada tanggal 25 Maret 2010 di hadapan Notaris Syahrir Mandeali, SH., notaris di Makassar dengan akta No.371, dimana Anggaran Dasar Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia No. AHU-60295.AH.01.02 tanggal 27 Desember 2010.⁶⁹

2. Visi, Misi dan Struktur Organisasi

BPRS Investama Mega Bakti tentunya memiliki Visi dan Misi untuk mengembangkan perusahaanya. Berikut Visi dan Misi BPRS Investama Mega Bakti:⁷⁰

⁶⁹ BPRS Investama Mega Bakti, "Sejarah", <http://bprinvestama.com/statis-8-sejarah.html> (Di akses tanggal 2 Agustus 2019)

⁷⁰ Arsip Dokumen BPRS Investama Mega Bakti, (Di akses tanggal 8 Juli 2019)

Visi :

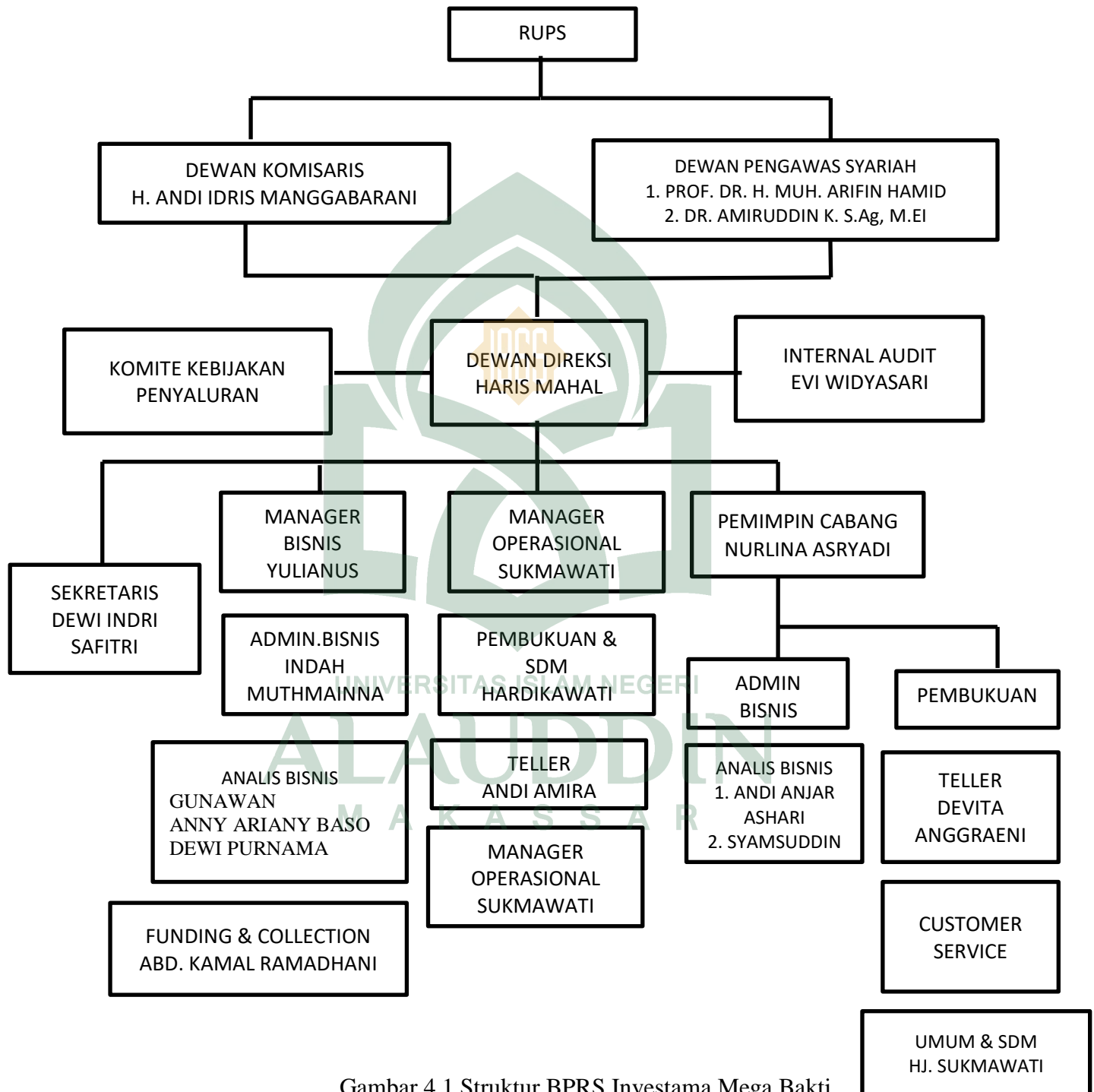
- a. Berupaya untuk melakukan dan menjalankan usaha perbankan syariah yang sehat untuk menjunjung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi.
- b. Berusaha untuk menambah dan menyediakan jasa perbankan syariah pada skala kecil serta memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat dalam bermuamalah dibidang ekonomi islam dan beribadah melalui aktifitas ekonomi syariah yang berdasarkan pada asas keislaman (Al-Qur'an dan As-Sunnah)

Misi :

- a. Selalu memiliki cita-cita untuk menjadikan BPR Syariah sebagai Lembaga Perbankan Syariah yang diminati dan dilirik oleh masyarakat pengguna jasa perbankan.
- b. Memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat pada umumnya, bahwa PT. BPRS Syariah Investama Mega Bakti adalah sebuah Lembaga perbankan/pembiayaan yang mendapat penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dibentuk oleh pemerintah secara independent.
- c. Memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian keuntungan BPRS secara menyeluruh pada tingkat cabang

STRUKTUR ORGANISASI

PT. BPRS INVESTAMA MEGA BAKTI MAKASSAR



Gambar 4.1 Struktur BPRS Investama Mega Bakti

3. Produk-produk di BPRS Investama Mega Bakti

Produk-produk yang ditawarkan BPRS Investama Mega Bakti sebagai berikut:⁷¹

a. Tabungan iB

1) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah simpanan/dana pihak ke tiga yang mana dana akan dikelola secara syariah oleh pihak bank (*mudharib*) dan diberikan kepada nasabah (*shahibul maal*) berupa bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan dana pihak ketiga yang dititipkan kepada pihak bank.

3) Syarat dan Ketentuan

a) Perorangan

(1) Mengisi aplikasi tabungan/deposito

(2) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku.

b) Badan Usaha

(1) Mengisi aplikasi tabungan/deposito

⁷¹ BPRS Investama Mega Bakti, “Produk Kami”, <http://bprsinvestama.com/>, (Di akses tanggal 2 Agustus 2019).

(2) Menyerahkan akta pendirian/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum

(3) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

(4) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku dari pengurus yang mewakili badan usaha/perusahaan

(5) Kartu identitas lainnya yang masih berlaku

(6) Setoran awal tabungan IB minimal Rp. 250.000,-

(7) Setoran tunai berikutnya minimal Rp. 10.000,-

(8) Saldo minimum Rp. 10.000,-

(9) Biaya penutupan rekening sebesar Rp. 50.000,-

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk modal/dana yang diberikan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk dikelola (tanpa *sharing* dana nasabah) dengan bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Jangka Waktu

a) Jangka waktu pembiayaan untuk sistem pembayaran maksimal 1 tahun

b) Jangka waktu pembiayaan dengan sistem pembayaran secara angsuran (pokok dan bagi hasil) maksimal 3 bulan.

c) Syarat

(1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan

(2) Fotocopy suami dan istri

- (3) Fotocopy SIM suami/istri (bila ada)
- (4) Fotocopy kartu keluarga
- (5) Fotocopy akta nikah
- (6) Fotocopy SHM/SHGB, tanah dan bangunan (jaminan)
- (7) Izin mendirikan (IMB)
- (8) PBB tahun berjalan
- (9) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- (10) Fotocopy SITU, SIUP, TDP atau SKU
- (11) Fotocopy rekening Koran 3 bulan terakhir
- (12) Slip gaji terakhir dari instansi atau pemerintah
- (13) Laporan keuangan perusahaan/usaha

d) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* merupakan bentuk kerjasama/kongsi antara pihak Bank dan nasabah dalam suatu usaha (dengan *Sharing* dana nasabah) dengan hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi dan yang diberikan.

e) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara Bank dan Nasabah, bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjual kepada nasabah sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Deposito iB

Beberapa penjelasan tentang produk deposito antara lain:

- 1) Simpanan/dana pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati antara pihak Bank dan Nasabah.
- 2) Jangka waktu deposito Ib 1,3,6,12 serta dapat diperpanjang otomatis
- 3) Dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan.

Adapaun syarat ketentuan penggunaan deposito yaitu sebagai berikut :

- 1) Perorangan
 - a) Mengisi aplikasi tabungan/deposito
 - b) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku
- 2) Badan Usaha
 - a) Mengisi aplikasi tabungan/deposito
 - b) Menyerahkan akta pendirian perusahaan/anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum
 - c) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - d) Fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku dari pengurus yang mewakili badan usaha/perusahaan
 - e) Kartu identitas lainnya yang masih berlaku
 - f) Setoran awal deposito iB MIN Rp. 250.000,-

B. Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Pembiayaan Syariah Investama Mega Bakti

Akad secara bahasa berarti ikatan (*ar-ribhtu*), perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*), dalam fikih didefinisikan dengan *irbathu ijabin bi qabulin 'ala wajhin masyurin'* yatsbutu atsaruhi fi mahallihi, yakni pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Akad dapat diartikan kontrak antara dua belah pihak, kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁷² Kesepakatan yang dibuat untuk melakukan pembiayaan terhadap berbagai kegiatan ekonomi riil.

Hasil penelitian ini telah melewati fase pengujian keabsahan data yang mana ,menggunakan metode triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Wawancara berbagai responden telah dituangkan dalam penelitian ini, wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan yang terjadi di BPRS Investama Mega Bakti Makassar dengan merujuk pada narasumber dari nasabah di BPRS tersebut dan dari pihak BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Penelitian ini juga teruji dengan dilakukan penyesuaian hasil dari wawancara tersebut dengan literatur-literatur yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁷² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 18.

1. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Syariah

Beberapa hal ketentuan pembiayaan *mudharabah* yang dijelaskan oleh informan yakni bapak Yulianus Sumule selaku manajer pembiayaan di BPRS Investama Mega Bakti, menyatakan sebagai berikut :

“Jadi ketentuan dalam pembiayaan *Mudharabah* ada beberapa yah, pertama pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kedua dalam pembiayaan itu lembaga keuangan syariah sebagai Shahibul Maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai Mudharib atau pengelola usaha. Ketiga jangka waktu usahanya, tata cara pengembalian dananya, dan pembagian keuntungannya itu ditentukan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan keuntungannya itu ditentukan kesepakatan kedua belah pihak dengan Pengusaha). Keempat mudharib atau nasabah boleh melakukan usaha yang disepakati bersama dan sesuai syariah dan lembaga keuangan syariah *nggak* ikut dalam manajemen perusahaan ataupun proyeknya, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kelima jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan sejelas-jelasnya dalam bentuk tunai yah bukan piutang. Keenam ini yang terakhir yah sebagai penyedia dana kami menanggung semua kerugian, kecuali kalau *Mudharib* (Nasabah) yang melakukan kesalahan yang disengaja lalai, atau menyalahi perjanjian”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan pihak BPRS ada beberapa ketentuan pada pembiayaan *mudharabah*, seperti halnya pengertian pembiayaan yang dijelaskan merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Modal usaha yang diberikan sepenuhnya dari bank yang kemudian dikelola oleh nasabah, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Apabila terdapat kerugian maka pihak bank akan menanggung seluruh kerugiannya, kecuali terdapat kelalaian dari pengelola itu sendiri maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola (nasabah).

⁷³ Yulianus Sumule, Manager Bisnia BPRS Investama Mega Bakti, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2019

Pada ketentuan pembiayaan *mudharabah* tersebut juga dijelaskan mengenai adanya jaminan, seperti halnya hasil wawancara peneliti dengan informan salah satu nasabah yang mengambil pembiayaan *mudharabah*, yang menyatakan bahwa :

”jaminannya sertifikat rumah, bagi hasilnya itu yah sesuai ji dulu sama kesepakatan sudah dihitung memangmi jadi tiap bulan saya angsur pokoknya sama bagi hasilnya, kalau laporan keuangan memang saya nda serahkan laporan keuangan tiap bulannya.”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara peneliti dengan nasabah ialah adanya penerapan jaminan berupa penyerahan sertifikat rumah nasabah kepada pihak BPRS Investama Mega Bakti serta adanya ketidakjelasan nasabah dalam pelaporan keuangan kepada BPRS membuat transaksi tersebut tidak transparan. Hal ini juga dibenarkan oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa :

“oh iya tentu saja kita berlakukan sistem jaminan, karena toh untuk menghindari adanya penyimpangan. Ini juga kita berlakukan karena memang nasabah itu tidak kasih kita laporan keuangan tiap bulan jadi kita belum bisa mempercayai 100% pinjaman yang diberikan ke nasabah, kalau toh juga mereka untung besar mereka kasi hasilnya tetapji begitu nda naikki”⁷⁵

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa ketidakpercayaan secara meyeluruh oleh BPRS pada nasabah membuat pihak BPRS memberikan syarat penyerahan jaminan untuk pengajuan pembiayaan dengan menghindari adanya penyimpangan. Jaminan tersebut dapat dijual dengan cara yang halal untuk menutupi kekurangan pengembalian dana yang nasabah terima.

⁷⁴ Hadelyn, Nasabah BPRS Investama Mega Bakti pada Akad *Mudharabah*, Wawancara, Tanggal 01 Oktober 2019.

⁷⁵ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2019.

2. Mekanisme Pembiayaan pada Akad *Mudharabah*

Setelah peneliti melakukan penelitian di BPRS Investama Mega Bakti dengan metode wawancara kepada pihak BPRS yang menjadi informan, maka dapat dipaparkan temuan penelitian terkhusus pada mekanisme pembiayaan pada akad *mudharabah*. Pada mekanisme transaksi pembiayaan *mudharabah* peneliti akan menjelaskan proses pengajuan pembiayaan, survey, persetujuan pembiayaan hingga keputusan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan dari pihak BPRS Investama Mega Bakti menyatakan bahwa :

“*kan* harus liat dokumennya kalau dia (nasabah) lakukan permohonan kita liat apa kebutuhannya, jenis usahanya apa, dia isi formulir, kita lakukan survey layak nggak kita layani ini, sesudah itu kita lakukan pra-komite baru komite. Ada putusan baru dibuatkan akad, itupun harus melalui notaris karena bagaimana akad itu kalau tidak kerjasama dengan pihak notaris aspek yuridisnya itu lemah, nah kemudian hari terjadi perselisihan kita nda ada kekuatan sehingga perlu adanya notaris.”⁷⁶

Hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam memenuhi pengajuan pembiayaan sampai adanya putusan bahwa nasabah tersebut disetujui untuk mengambil pembiayaan tersebut. Langkah yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengambilan pembiayaan melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu:

⁷⁶ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti di Kota Makassar, Wawanara, Tanggal 27 Mei 2019.

a. Pengajuan Pembiayaan

Di tahap awal calon nasabah secara langsung mendatangi Bank Pembiayaan rakyat Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, setelah calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan tersebut ia diminta pihak marketing untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang diikutsertakan data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk wirausaha, calon nasabah juga menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Yulianus Sumule selaku manager bisnis di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, yang menyatakan :

“permohonan toh, lengkapi formulir sama dokumen kayak KK, KTP, Surat Nikah, kelengkapan dokumen usahanya nah terus calon nasabah datang terus cerita apa kebutuhannya terus kita daftarmi, begituji simple, kita pakai jg B-checking tetap, nah maksudnya daftar dari bank misalnya dia ada pembiayaan di bank lain, kalo dia ada di level 2 kita masih oke nah kalo 3 atau 4 kita pertanyakanmi bisa tidak dia handle, terus kalo okemi ada nanti persetujuan, tapi kalo yang bermasalah tolong diselesaikan dulu lah kalo tidak biasanya kita tidak lanjut.”⁷⁷

Calon nasabah melakukan permohonan dengan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, serta kelengkapan dokumen usahanya seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* di pembahasan sebelumnya selanjutnya calon nasabah menyerahkan seluruh syarat dan ketentuan tersebut kepada Customer Service yang melayani. Pihak BPRS Investama Mega Bakti juga

⁷⁷ Anny Ariany Baso, Analisis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2019.

melakukan *B-checking* yang mana untuk memastikan calon nasabah tersebut tidak memiliki pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan yang lain.

b. Pemeriksaan/survey

Pada tahap ini pihak BPRS menindak lanjut pengajuan pembiayaan dengan cara mensurvey ke tempat calon nasabah, baik itu jaminan, tempat tinggal maupun taempat usaha yang calon nasabah jalankan. Hal tersebut sesuai penunturan ibu Anny Ariany Baso selaku Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, yang menyatakan bahwa :

“setelah itu kita survey usaha, tempat tinggal, survey di tetangganya juga untuk memastikan toh bahwa betul tidak usaha itu punya si calon nasabah survey jaminan, maksudnya ini marketable tidak jaminannya terus usahanya juga bagusji terus misalnya jumlah pembiayaannya yang mau dia minta sesuai ji”⁷⁸.

Survey dilakukan dengan cara mengunjungi tempat usaha, tempat tinggal nasabah serta beberapa tetangga terdekat yang bertujuan untuk pendataan atau informasi terkait usaha yang dijalankan milik calon nasabah layak untuk diberikan pemnbiayaan. Survey jaminan juga dilakukan untuk mengukur nilai jaminan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh calon nasabah.

c. Persetujuan Pembiayaan

Pada tahap ketiga, setelah BPRS mendapatkan informasi dari lapangan kemudian pihak komite dan pengelola menganalisa dan memusyawarahkan hasil survey yang telah dilakukan. Hal demikian juga sesuai dengan wawancara bapak

⁷⁸ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2019

Yulianus Sumule selaku manager bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa:

“setelah survey, kita dapatkan informasi calon nasabah selanjutnya data tersebut dibawa ke pra-komite untuk kemudian dibawa ke komite supaya bisa diambil keputusan pembiayaan setelah dilakukan analisis dan musyawarah, kalau pembiayaan diterima barulah nasabah diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.”⁷⁹

Hasil wawancara menunjukkan pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan calon nasabah dilakukan setelah adanya analisis dan musyawarah. Jika pembiayaan tersebut diterima maka pihak BPRS meminta kepada calon nasabah untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, setelah itu pihak BPRS menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah dilapangan dan kemudian menentukan jadwal akan dilaksanakan akad tersebut.

d. Keputusan Pembiayaan

Pengambilan keputusan melalui musyawarah komite yang terdiri atas komisariss, direksi, admin legal dan marketing penyaji. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan bapak Yulianus Sumule selaku manager bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa :

“nah setelah dibawa ke pra-komite nanti dibawa lagi ke komite lalu bisami dibuatkan akadnya, baru dibuatkan surat pemberitahuan pembiayaan ke nasabah”⁸⁰

⁷⁹ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2019.

⁸⁰ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2019.

Tahap selanjutnya pada mekanisme ini yaitu apabila permohonan pembiayaan *mudharabah* telah disetujui dalam musyarah komite, maka pihak BPRS Investama Mega Bakti membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat akad pembiayaan.

3. Bagi hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau nisbah.

Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil diterapkan pada bank syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan *Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Sistem bagi hasil yang terdapat pada BPRS Investama Mega bakti adalah sistem *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, hal ini sesuai dengan penuturan informan di BPS Investama Mega Bakti, bahwa :

“Untuk *mudharabah* bagi hasilnya kita ditetapkan di awal tanpa ada potongan biaya operasional, dikarenakan kalau di perdagangan sistemnya memang tiap bulan nda tentu pasti kita juga Cuma kasi saja modal nanti dia (nasabah) yang

kelola jadi biaya-biaya lain untuk usahanya nasabah yang tanggung.”⁸¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa BPRS Investama Mega Bakti telah menetapkan konsep bagi hasil dengan *revenue sharing* pada pembiayaan *mudharabah* yang mana bagi hasil ditentukan dari seluruh jumlah keuntungan lalu dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai presentasi bagi hasil yang disepakati.

4. Kesesuaian Implementasi Akad Mudharabah dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan BPRS Investama Mega Bakti dapat diketahui implementasi akad pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan yang kemudian akan disandarkan dengan teori-teori mengenai akad pembiayaan *mudharabah* dengan hukum islam perlu adanya analisa sebagai berikut:

Ketentuan pembiayaan pada akad *mudharabah* menurut fatwa DSN-MUI No 7 dan 8 tahun 2000 telah peneliti jelaskan sebelumnya pada BAB II dan menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak BPRS Investama Mega Bakti Ketentuannya terbagi atas ketentuan pada akad, modal, keuntungan dan kerugian, serta sistem bagi hasilnya.

Akad dalam segi bahasa berarti segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri. Secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan antara *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya. Jadi, akad dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan antara dua belah pihak

⁸¹ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2019

berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui bersama.⁸² Aspek legalitas dari orang yang melakukan transaksi (muamalah) dalam melakukan akad harus memenuhi ketentuan akad itu sendiri yang memenuhi rukun dan syarat akad seperti: Rukun dengan adanya penjual, pembeli. Barang, harga dan ijab Kabul. Syaratnya, adanya barang dan jasa harus halal. Harga yang transparan dan jelas, tempat penyerahan yang jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.⁸³ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa / 4 : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya dalam bermuamalah atau bertransaksi dalam segala jenis dengan cara yang adil dengan tidak memperoleh harta dengan cara yang batil dan tidak mendzalimi satu sama lain serta bersifat suka sama suka atau ridha sama ridha antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Mudharabah adalah akad pembiayaan yang terdapat di BPRS Investama Mega Bakti. *Mudharabah* adalah bentuk kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan aktivitas yang

⁸² Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 3.

⁸³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

produktif yang sama keuntungan di bagi kedua belah pihak antara pemilik modal dan pengelola dana. Apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.⁸⁵ Islam tidak melarang dengan bentuk transaksi *mudharabah* sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Muzammil/ 73 :20.

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya:

dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;...

Argumen dari surah Al- Muzammil ayat 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

Begitu pula dengan hadist yang dijelaskan bahwa Rasulullah tidak melarang adanya transaksi *mudharabah*.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ قَالَ:
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ،
عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ، لَبَيْتَ لَا لِلْبَيْعِ»

⁸⁵ Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 195.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 575.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin AlQasim dan Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelas untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”.⁸⁷

Hadist dapat dipahami bahwa praktek kerjasama *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan didalamnya diantaranya jual beli yang memberikan tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelas atau makanan pokok untuk konsumsi masyarakat sehari-hari, seperti yang telah terealisasi di BPRS Investama Mega Bakti bahwa akad mudharabah ini sah-sah saja untuk dijalankan berupa modal usaha.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Investama Mega Bakti dengan mewawancarai narasumber di BPRS tersebut dapat kita katakan bahwa memang akad sudah sesuai dengan landasan hukum berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist, gharar, dan *riba* karena dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN No 7 & 8 tentang *mudharabah* masih adanya syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini sesuai pernyataan oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti yang menyatakan bahwa :

“Ya di awal juga presentase bagi hasilnya, awalnya kita kasih tau biasanya segini kalau dia setuju ya kita jalani, kalau dia minta diturunkan sedikit margin bagi hasilnya ya kita tanya ke atasan dulu, jadi memang kesepakatan

⁸⁷ Ibnu Majah Abu Abdllah Muhammad bin Yazid bin Majah al Qazwini, *Musnah Ibnu Majah, Juz II*, (Cet: I; Arab: tt), h, 768.

diawal. kalaupun diturunkan ya memang ini sih sudah pernah ambil pembiayaan.”⁸⁸

Hasil wawancara menunjukkan adanya unsur riba dari penentuan bagi hasil yang telah dipatok oleh BPRS secara sepihak, meskipun adanya negosiasi presentase bagi hasil belum tentu diterima pengajuannya kecuali yang pernah mengambil pembiayaan *mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti. Hal ini dikarenakan adanya sifat *gharar* pada laporan keuangan yang tidak diberikan oleh nasabah kepada pihak BPRS, hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa :

”kalau bagi hasil tiap bulannya samaji jadi memang sudah sekian (jumlah nominal bagi hasil dan pokok) dikasika sama bank baru ndada saya kasih memang laporannya tiap bulan keuntunganku berapa, karena kupikir begitu saja saya kasih tiap bulan ke bank.”⁸⁹

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh nasabah sehingga pihak BPRS mematok atau menetapkan pokok pengembalian dan bagi hasil secara sepihak untuk menghindari adanya penyimpangan ataupun kecurangan yang bisa saja yang dilakukan oleh nasabah. Hal inipun seharusnya diperhatikan lagi lebih jeli oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti agar melakukan pemantuan dengan cara detail agar nasabah secara transparan memberikan laporan usahanya.

⁸⁸ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2019

⁸⁹ Hadelyn, Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2019

Pihak BPRS Investama Mega bakti dalam melakukan akad tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah tertera dengan jelas pada fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang menjelaskan bahwa: Pertama, penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.⁹⁰ Pihak BPRS Investama Mega Bakti Makassar sebagai *shahibul maal*, dan sebagai nasabah (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Cakap hukum yang dimaksudkan ialah harus juga memenuhi syarat seperti subyek hukum bukan hanya manusianya, namun berbentuk badan hukum yang sah, dengan ini BPRS Investama Mega Bakti Makassar secara kelembagaan sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi *mudharabah* yang diajukan oleh calon nasabah. Pihak pengelola usaha (*mudharib*) yaitu nasabah haruslah cakap hukum, secara hukum positif yang berlaku di Indonesia, calon nasabah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, surat tagihan listrik, untuk jaminan seperti BPKB, sertifikat rumah atau tanah dan data jaminannya berupa lokasi jaminan, harga pasaran jaminan yang berlaku, dan foto. Persyaratan tersebut terpenuhi seperti wawancara dengan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang menyatakan bahwa :

“ya itu kalau mau ambil pembiayaan harus bawa KTP, KK, Surat Nikah, Tagihan Rekening Listrik 3 bulan terakhir, sertifikat rumah untuk jaminannya itu baru bisa daftar itu pembiayaan.”⁹¹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat yang telah diberikan kepada

⁹⁰ Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*

⁹¹ Hadelyn, Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2019

nasabah dapat dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah*, yang mana jaminan yang diberikan pada pembiayaan *mudharabah* berupa sertifikat rumah berdasarkan rukun dan syarat kedua belah pihak haruslah cakap hukum telah sah secara hukum BPRS Investama Mega Bakti Makassar dan nasabah untuk melanjutkan akad *mudharabah*.

Kedua, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memerhatikan : pertama, penawaran dan penerimaan harus secara resmi menunjukkan tujuan kontak (akad). Kedua, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akada dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁹² Syarat ijab dan kabul di BPRS Investama Mega Bakti Makassar sudah sesuai dengan ditunjukkan adanya pengisian dan penandatanganan formulir pembiayaan *mudharabah*, seperti yang dikatakan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah* bahwa :

“yah di angsur, karena saya ambil uang yang lumayan banyaklah yah jadi angsuran itu selama 5 tahun, itu sudah dihitung pokoknya sama bunganya yah (bagi hasil) tiap bulannya”⁹³

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem angsuran dengan waktu 5 tahun yang telah terhitung pokok dan nilai jumlah bagi hasil tiap bulannya.

⁹² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁹³ Hadelyn, Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, Wawancara, Tanggal 2 Oktober 2019.

Ketiga, modal atas jumlah uang data/aset yang diberikan oleh penyediaa dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat : harus di ketahui jumlah dan jenisnya, dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai jumlahnya pada waktu akad, dan modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus di bayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahab maupun tidak, atau sesuai dengan kesepakatan dalam akad.⁹⁴ BPRS Investama Mega Bakti sudah merealisasikan akad pembiayaan *mudharabah* ini dengan memenuhi syarat modal yang telah dijelaskan. Modal diberikan kepada pihak nasabah dalam bentuk uang untuk usaha nasabah, seperti yang dikatakan oleh nasabah bahwa :

“pinjamnya yah 500 juta cash, untuk usaha las karena ada perumahan yang harus saya tangani itu buat pagarnya sama peralatan rumahnyalah yang bersangkutan sama las-lasan toh”,⁹⁵

Menurut wawancara tersebut sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam penanaman modal berupa uang tunai Rp. 500 juta yang disalurkan dari pihak BPRS Investama Mega Bakti kepada nasabah, uang tersebut digunakan untuk *mensupply* permintaan dari mitra kerja nasabah yaitu berupah perumahan yang nasabah tangani untuk pembuatan pagar pada pembiayaan *mudharabah*..

Pada keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang diperoleh sebagai kelebihan dari modal yang diberikan.⁹⁶ Pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dengan *mudharib* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

⁹⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.

⁹⁵ Hadelyn, Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, Wawancara, Tanggal 2 Oktober 2019.

- a. Diberikan kepada kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Keuntungan yang diberikan haruslah jelas, dikatakan jelas ialah adanya laporan dari pihak nasabah kepada BPRS untuk bukti transparansi dari perolehan dana keuntungan yang didapatkan oleh nasabah agar terhindarnya sifat *gharar* atau ketidakjelasan dalam bertransaksi. Hal ini sesuai syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah kepada pihak BPRS Investama Mega Bakti, seperti yang dijelaskan oleh narasumber di BPRS Investama Mega Bakti yang menyatakan bahwa:

“harus dong laporan tiap bulannya, yah laporan keuangan ajalah yang singkat supaya kita juga bisa laporkan pertanggungjawaban ke OJK sama DPS.”⁹⁷

Wawancara tersebut mengisyaratkan bahwa adanya laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk meninjau sejauh mana usaha nasabah tersebut berkembang, laporan keuangan dari nasabah yang nantinya juga akan menjadi laporan pertanggungjawaban dari pihak BPRS Investama Mega Bakti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ataupun Dewan Pengawas Syariah (DPS).

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dalam bentuk presentase/nisbah bagi hasil (jika terjadi perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan).

⁹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁹⁷ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2019

- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh *mudharib* (nasabah), dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan berupa kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

Realisasi pembiayaan di BPRS Investama Mega Bakti ialah dengan memberikan 100% modal kepada nasabah dan bagi hasil dengan presentase 40% untuk bank dan 60% untuk nasabah atau presentase 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Anny Baso selaku Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, yang menyatakan bahwa :

“terus kalo yang sistem angsuran (*mudharabah*) kita tentukan toh maksudnya tiap bulan memang sudah di hitung pokok dan jumlahnya bagi hasilnya, kalo sistem *mudharabah* sistem bagi hasil memang tawwa dari istilahnya laporan keuangan dalam bentuk nisbah perbulannya, misalnya dalam bentuk 70:30 atau 60:40. Cuman itu yang susah laporannya tiap bulan mereka tidak laporkan ke kita, tidak mungkin dong misalnya ternyata banyak keuntungannya kira-kira nasabah mau kasih lebih, tidak pasti kan, makanya kita biasanya patokmi pokoknya sama jumlah bagi hasilnya.”⁹⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa bagi hasil menggunakan *Revenue Sharing* yang mana hasil keuntungan secara keseluruhan yang diberikan kepada BPRS Investama Mega Bakti dari nasabah tiap bulannya. Pihak BPRS juga menerapkan ketentuan presentase bagi hasil 40% untuk BPRS dan 60% untuk nasabah keuntungan dari hasil usaha diluar pokok pinjaman yang diberikan, hal ini nantinya disepakati oleh nasabah untuk melanjutkan akad dan apabila nasabah tidak setuju dengan presentase tersebut akad ini dianggap dibatalkan karena ketentuan ini

⁹⁸ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2019

diberlakukan untuk mengurangi resiko kecurangan calon nasabah dalam pemberian hasil keuntungan dikarenakan banyak terjadi pada nasabah lainnya.

Perhitungan *nisbah* hasil di sepakati pada awal akad dengan sistem angsuran di *mudharabah* yakni dengan peminjaman Rp. 500.000.000, diangsur selama 5 tahun dengan nisbah bagi hasil 40%. Hal ini sesuai dengan wawancara nasabah yang menyatakan bahwa :

“iya Rp. 21.400.000,- perbulannya itu selama 5 tahun, tapi kalau saya hitung wah banyak sekali untungnya BPRS jadi saya usahakan semaksimal mungkin saya tutupi pas tahun ke 4 itu Rp.200.000.000,- saya kembalikan modalnya yang dia kasika BPRS supaya nda berat sekali mi toh.”⁹⁹

Bagi hasil harusnya dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh tiap bulan dari nasabah, namun dalam tiap bulannya nasabah harus membayar uang pokok dan bagi hasil sebesar Rp. 21.400.000 selama 5 tahun yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti dan disetujui oleh nasabah, yang mana jika diakumulasikan dari angsuran tersebut selama 60 bulan ialah Rp. 1.284.000.000,-, dengan demikian analisa yang telah dibuat oleh pihak BPRS dengan angsuran Rp. 21.400.000,- perbulan selalu dibayar sama setiap bulannya. Perhitungan seperti ini termasuk perhitungan bank konvensional, yang mana apabila pihak nasabah mengalami kerugian pihak BPRS tidak menanggungnya. Hal ini dibenarkan oleh analis bisnis di BPRS Investama Mega Bakti Makassar yang menyatakan bahwa :

“sebenarnya kita ndamau tahu sih ya, harusnya tanggungan bersama asal dianya jujur juga, misal ada laporan tiap bulan tapikan selama ini nda ada laporan, nanti berapa bulan macet baru dia bilang begini-begini, nda mungkin

⁹⁹ Hadelyn, Nasabah Pembiayaan Akad *Mudharabah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 2 Oktober 2019.

dong istilahnya kita terima begitu saja.”¹⁰⁰

Kerugian yang terjadi pada nasabah tidak ditanggung oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti dikarenakan tidak adanya laporan keuangan yang diberikan kepada pihak BPRS Investama Mega Bakti membuat adanya ketidakpercayaan pada nasabah.

Hal ini tentu saja tidak mencerminkan prinsip syariah yang tidak ada *riba*, *gharar*, dan *maishir*. Transaksi ini dinyatakan *riba* karena nilai jumlah pokok dan bagi hasil tetap di tetapkan diawal oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti, transaksi ini dapat dikatakan *maishir* karena adanya spekulasi keuntungan yang dihitung oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti Makassar, dan transaksi ini dikatakan *gharar* karena ketidakjelasan laporan keuangan dari nasabah ke pihak BPRS yang membuat ketidakpercayaan BPRS kepada nasabah.

C. Implementasi Akad Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah Investama Mega Bakti

Pada pembahasan akad pembiayaan *mudharabah* telah peneliti jelaskan pengertian akad dan telah dijelaskan pula bahwa hasil penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Pada akad pembiayaan *musyarakah* pun sudah dilakukan uji keabsahan data dengan metode triangulasi data.

1. Ketentuan pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* menurut islam dalam bukunya yang berjudul *Perbankan Syariah*, menyatakan bahwa :

¹⁰⁰ Anny Ariany Baso, Analisis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2019

“*Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, yang mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyawarah disebut juga dengan *syirkah* merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.”¹⁰¹

Pembiayaan *musyarakah* ialah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi sesuai kesepakatan dan pengelolaannya dapat dijalankan bersama, bagi hasilnya pun sesuai dengan kesepakatan bersama. Dijelaskan pula beberapa hal tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* oleh bapak Yulianus Summule selaku manager bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan ketentuan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut :

“Pembiayaan *musyarakah* juga ada ketentuannya, nah pertama dari segi modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang dinilainya sama, bisa juga seperti aset perdagangan, *kayak* barang-barang dan property, nah kalau modal berbentuk aset harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Kedua dari segi kerjanya partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukan syaratnya. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan boleh menuntut bagian dari keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Ketiga dari segi keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dari sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah* . setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya. Keempat dari segi kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing- masing dalam modal. Nah terkahir biaya proporsional dan persengketaan, biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalau

¹⁰¹ Ismail, *Perbanka Syariah*, h. 176.

musyawarah mufakat.¹⁰²

Ketentuan yang telah dijelaskan oleh pihak BPRS syariah meliputi beberapa hal yaitu, dari aspek modalnya seperti uang tunai atau barang property dapat pula asset perdagangan yang nantinya dinilai dengan tunai dan disepakati bersama, dari aspek kerjanya dibutuhkan partisipasi para mitra untuk terlaksananya akad *musyarakah* ini, namun porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan bagiannya sesuai dengan modal atau keuntungan yang diinginkan, semua proses ini tertera pada awal akad.

Aspek keuntungan mitra secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Aspek kerugian harus dibagi secara proporsional diantara para mitra menurut saham masing-masing dalam modal. Pada aspek yang terakhir yaitu biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Apabila terjadi perselisihan atau penyimpangan salah satu mitra akad diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui *musyawarah*.

Pada ketentuan akad *musyarakah* di BPRS, dari segi kerugiannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sebagaimana wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah yang menyatakan bahwa :

¹⁰² Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti, Wawancara, Tanggal 24 Juli 2019

“kalau usaha itu rugi mereka *nda* mau tahu, bagi hasil memang rugi untuk dibagi sama-sama dong, tapi kalau rugi mereka *nda* mau, mereka mau untung apa bedanya sama konvensional, ditambah jumlah bagi hasil yang diterapkan terlalu tinggi misalkan saya ambil 138 juta nah pengembaliannya itu bisa mencapai 180 juta.”¹⁰³

Berdasarkan penjelasan nasabah tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa apabila nasabah mengalami kerugian pihak bank tidak mengambil bagian untuk menanggung kerugian yang didapatkan oleh nasabah. Nasabah juga merasa tidak diuntungkan dengan mengambil pembiayaan di BPRS Invesatama Mega Bakti untuk menanggung kerugian yang didapatkan oleh nasabah. Nasabah juga merasa tidak diuntungkan dengan mengambil pembiayaan di BPRS Invesatama Mega Bakti karena jumlah *nisbah* bagi hasil yang terlalu tinggi. Hal ini menggambarkan konsep pembiayaan *musyarakah* sesuai dengan prinsip syariah.

2. Mekanisme Pembiayaan pada Akad *Musyarakah*

Setelah peneliti melakukan penelitian di BPRS Investama Mega Bakti dengan metode wawancara kepada pihak BPRS yang menjadi informan, maka dapat dipaparkan temuan penelitian terkhusus pada mekanisme pembiayaan pada akad *musyarakah*. Pada mekanisme transaksi pembiayaan *musyarakah* peneliti akan memaparkan proses yang sama dengan *mudharabah*, yaitu pengajuan

¹⁰³ Yudha, Nasabah pada Akad Pembiayaan *Musyarakah*, Wawancara, Tanggal 21 Agustus 2019

pembiaayaan, survey, persetujuan pembiayaan hingga keputusan pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informasi dari pihak BPRS Invesatama Mega Bakti menyatakan bahwa :

“kan harus liat dokumennya kalau dia (nasabah) lakukan permohonan kita liat apa kebutuhannya, jenis usahanya apa, dia isi formulir, kita lakukan survey layak nggak kita layani ini, sesudah itu kita lakukan pra-komite baru komite. Ada putusan baru dibuatkan akad, itupun harus melalui notaris karena bagaimanapun akad itu kalau kita kerjasama dengan pihak notaris aspek yuridisnya itu lemah, nah kemudian hari terjadi perselisihan kita nda ada kekuatan sehingga perlu adanya notaris.”¹⁰⁴

Hasil wawanacara teresebut dapat kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam memenuhi pengajuan pembiayaan sampai adanya putusan bahwa nasabah tersebut disetujui untuk mengambil pembiayaan tersebut. Langkah yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam pengambilan pembiayaan melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu :

a. Pengajuan Pembiayaan

Di tahap awal calon nasabah secara langsung mendatangi Bank Pembiayaan rakyat Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *musyarakah*, setelah calon nasabah melakukan pengajuan pembiayaan tersebut ia diminta pihak marketing untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang diikutsertakan data pemohon, data pembiayaan, data pekerjaan, data untuk wirausaha, calon

¹⁰⁴ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti di Kota Makassar, Wawancara, Tanggal 27 Mei 2019

nasabah juga menjelaskan kebutuhan dana sebagai modal kerja. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan bapak Yulianus Sumule selaku manager bisnis di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, yang menyatakan :

“permohonan toh, lengkapi formulir sama dokumen kayak KK, KTP, Surat Nikah, kelengkapan dokumen usahanya nah terus calon nasabah datang terus cerita apa kebutuhannya terus kita daftarmi, begituji simpel, kita pakai jg B-checking tetap, nah maksudnya daftar dari bank misalnya dia ada pembiayaan di bank lain, kalo dia ada di level 2 kita masih oke nah kalo 3 atau 4 kita pertanyakanmi bisa tidak dia handle, terus kalo okemi ada nanti persetujuan, tapi kalo yang bermasalah tolong diselesaikan dulu lah kalo tidak biasanya kita tidak lanjut.”¹⁰⁵

Calon nasabah melakukan permohonan dengan membawa dokumen yang dibutuhkan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, serta kelengkapan dokumen usahanya seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan syarat dan ketentuan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di pembahasan sebelumnya selanjutnya calon nasabah menyerahkan seluruh syarat dan ketentuan tersebut kepada Customer Service yang melayani. Pihak BPRS Investama Mega Bakti juga melakukan B-checking yang mana untuk memastikan calon nasabah tersebut tidak memiliki pembiayaan bermasalah pada Lembaga Keuangan yang lain.

b. Pemeriksaan/survey

Pada tahap ini pihak BPRS menindak lanjut pengajuan pembiayaan dengan cara mengsurvey ke tempat calon nasabah, baik itu jaminan, tempat tinggal maupun tempat usaha yang calon nasabah jalankan. Hal tersebut sesuai penunturan ibu Anny Ariany Baso selaku Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, yang

¹⁰⁵ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2019.

menyatakan bahwa :

“setelah itu kita survey usaha, tempat tinggal, survey di tetangganya juga untuk memastikan toh bahwa betul tidak usaha itu punya si calon nasabah survey jaminan, maksudnya ini marketable tidak jaminannya terus usahanya juga bagusji terus misalnya jumlah pembiayaannya yang mau dia minta sesuai ji”¹⁰⁶.

Survey dilakukan dengan cara mengunjungi tempat usaha, tempat tinggal nasabah serta beberapa tetangga terdekat yang bertujuan untuk pendataan atau informasi terkait usaha yang dijalankan milik calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan. Survey jaminan juga dilakukan untuk mengukur nilai jaminan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh calon nasabah.

c. Persetujuan Pembiayaan

Pada tahap ketiga, setelah BPRS mendapatkan informasi dari lapangan kemudian pihak komite dan pengelola menganalisa dan memusyawarahkan hasil survey yang telah dilakukan. Hal demikian juga sesuai dengan wawancara bapak Yulianus Sumule selaku manager bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa:

“setelah survey, kita dapatkan informasi calon nasabah selanjutnya data tersebut dibawa ke pra-komite untuk kemudian dibawa ke komite supaya bisa diambil keputusan pembiayaan setelah dilakukan analisis dan musyawarah, kalau pembiayaan diterima barulah nasabah diminta untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan.”¹⁰⁷

Hasil wawancara menunjukkan pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan calon nasabah dilakukan setelah adanya analisis

¹⁰⁶ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2019

¹⁰⁷ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2019.

dan musyawarah. Jika pembiayaan tersebut diterima maka pihak BPRS meminta kepada calon nasabah untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, setelah itu pihak BPRS menentukan jumlah pembiayaan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan calon nasabah dilapangan dan kemudian menentukan jadwal akan dilaksanakan akad tersebut.

d. Keputusan Pembiayaan

Pengambilan keputusan melalui musyawarah komite yang terdiri atas komisaris, direksi, admin legal dan marketing penyaji. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan bapak Yulianus Sumule selaku manager bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa :

“nah setelah dibawa ke pra-komite nanti dibawa lagi ke komite lalu bisami dibuatkan akadnya, baru dibuatkan surat pemberitahuan pembiayaan ke nasabah”¹⁰⁸

Tahap selanjutnya pada mekanisme ini yaitu apabila permohonan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah disetujui dalam musyawarah komite, maka pihak BPRS Investama Mega Bakti membuat surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada calon nasabah dan membuat akad pembiayaan.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana, jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai

¹⁰⁸ Yulianus Sumule, Manager Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 27 Mei 2019.

dengan kesepakatan. Kesepakatan bagi hasil ini ditetapkan dengan suatu angka tingkat rasio bagi hasil atau *nisbah*.

Mekanisme perhitungan tingkat bagi hasil diterapkan pada bank syariah terdiri dari dua system, yaitu *Profit Sharing* bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana dan *Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Sistem bagi hasil yang terdapat pada BPRS Investama Mega bakti adalah system *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*, hal ini sesuai dengan penuturan informan di BPS Investama Mega Bakti, bahwa :

“nah kalau untuk *musyarakah* perhitungan bagi hasilnya dikurangi dulu sama biaya-biaya produksi dan lain-lain baru bisa di dapat beberapa nilai jumlah bagi hasilnya yang dibagi anantara nasabah sama bank.”¹⁰⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada akad pembiayaan *musyarakah* BPRS Invesatama Mega Bakti telah menetapkan konsep bagi hasil dengan *profit sharing* yang mana BPRS menentukan bagi hasil dari jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya-biaya produk diawal.

4. Kesesuaian Implementasi Akad *Musyarakah* dengan Prinsip Syariah

Hasil wawancara peneliti dengan BPRS Investama Mega Bakti dan nasabah dapat diketahui implementasi akad pembiayaan *musyarakah* yang diterapkan dan kemudian akan disandarkan dengan teori-teori mengenai akad pembiayaan *musyarakah* dengan hukum Islam perlu adanya analisa sebagai berikut:

¹⁰⁹ Anny Ariany Baso, Analis BPRS Investama Mega Bakti Kota Makassar, Tanggal 7 Agustus 2019

Ketentuan pembiayaan pada akad *musyarakah* menurut fatwa DSN-MUI No 8 tahun 2000 telah peneliti jelaskan sebelumnya pada BAB II dan menurut hasil wawancara peneliti dengan pihak BPRS Investama Mega Bakti ketentuannya terbagi atas ketentuan pada akad, modal, keuntungan dan kerugian, serta sistem bagi hasilnya.

Pada pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, yang mana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.¹¹⁰ Islam tidak melarang adanya transaksi dengan akad *musyarakah* dengan Q.S Shaad/ 38 : 24

Q.S Shaad / 38 : 24

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Terjemahannya :

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersifat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.”¹¹¹

Pada lafadz surah (38) ayat 24, lafal al-khulatha diartikan syaruka, yakni orang-orang yang harta mereka untuk dikelola bersama, dengan demikian adanya anjuran bagi orang-orang yang ingin melakukan transaksi dengan akad *musyarakah* dengan rukun dan syarat yang dipenuhi antar orang yang melakukan usaha bersama.

Hadist yang menjelaskan Rasulullah tidak melarang *musyarakah* sebagai berikut :

¹¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.176

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 454

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya, ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.¹¹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapatkan perniagaan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelaskan meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya. Akad *musyarakah* ini juga terealisasi di BPRS Investama Mega Bakti dan hal tersebut sah-sah saja dilakukan dan tidak ada larangannya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Investama Mega Bakti dengan mewawancarai narasumber di BPRS tersebut dapat kita katakan bahwa memang akad sesuai dengan landasan hukum berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist,

¹¹² Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syadad, *Musnad Abu Dawud*, Juz III, (Cet: I; Beirut: Al-Maktabatul Ashrih), h.256

namun adanya sifat gharar, dan riba karena dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN No. 8 tentang *musyarakah* masih adanya syarat yang tidak terpenuhi. Hal ini sesuai pernyataan oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti yang menyatakan bahwa :

“Ya di awal juga presentase bagi hasil, awalnya kita kasih tau biasanya segini kalau dia setuju kita jalani, kalau dia minta diturunkan sedikit margin bagi hasilnya ya kita tanya atasan dulu, jadi memang kesepakatan diawal. Kalau diturunkan ya memang ini sih sudah pernah ambil pembiayaan.”¹¹³

Hasil wawancara menunjukkan adanya unsur riba dari penentuan bagi hasil yang telah di patok oleh BPRS Investama Mega Bakti secara sepihak, meskipun adanya negosiasi presentase bagi hasil belum tentu diterima pengajuannya kecuali yang pernah mengambil pembiayaan *musyarakah* di BPRS Investama Mega Bakti. Hal ini dikarenakan adanya sifat *gharar* pada laporan keuangan yang tidak diberikan oleh nasabah kepada pihak BPRS Investama Mega Bakti, berikut hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* yang menyatakan bahwa :

“lebih menguntungkan di bank konvensional tidak menyiksa, kan dia pake sistem bagi hasilkan, bagi hasilnya ini luar biasa, 4% sampai 5% perbulan, ditentukan di awal jumlahnya, bayangkan meki kalau saya kredit 2M toh, kalau 3,5% nya itu beberapa, jadi hampir 75 juta perbulan nda cocok untuk bisnis, yah untuk kebutuhan terdesak saja, kalau tidak bisa hancurlah saya.”¹¹⁴

Hasil penelitian menyatakan bahwa bagi hasil BPRS terlalu tinggi perbulannya membuat nasabah kewalahan untuk mengembalikan pokok pinjaman

¹¹³ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2019

¹¹⁴ Yudha, Nasabah pada Akad Pembiayaan *Musyarakah* di BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 21 Agustus 2019

ditambah dengan bagi hasilnya, hal tersebut membuat resah nasabah yang menjalankan pembiayaan di akad *musyarakah* meskipun prosesnya terbilang cukup mudah dan cepat dalam pencarian dana.

Pihak BPRS Investama Mega Bakti dalam melakukan akad tersebut haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah tertera dengan jelas pada fatwa DSN No. 8/DSN-MUI /IV/2000 tentang *musyarakah* yang menjelaskan bahwa, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan, setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil, setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal, setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginventasikan dana untuk kepentingan sendiri.¹¹⁵

Pihak BPRS Investama Mega Bakti sebagai *shahibul maal*, dan sebagai nasabah (*mudharib*) sebagai pengelola modal. Cakap hukum yang dimaksudkan ialah harus juga memenuhi syarat seperti subyek hukum bukan hanya manusianya, namun berbetuk badan hukum yang sah, dengan ini BPRS Investama Mega Bakti Makassar secara kelembagaan sah untuk bertindak sebagai *shahibul maal* dalam transaksi

¹¹⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN-MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

musyarakah yang diajukan oleh calon nasabah. Pihak pengelola usaha (*mudharib*) yaitu nasabah harus cakap hukum, secara hukum yang berlaku di Indonesia, calon nasabah harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, surat tagihan listrik, untuk jaminan seperti BPKB, sertifikat rumah atau tanah dan data jaminannya berupa lokasi jaminan, harga pasaran jaminan yang berlaku, dan foto.

Persyaratan tersebut terpenuhi seperti wawancara dengan nasabah pembiayaan *musyarakah* yang menyatakan bahwa:

“syaratnya ya bawa KTP, KK, sertifikat jaminan, ya sertifikat tanah.”¹¹⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa syarat yang telah diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, yang mana jaminan yang diberikan pada pembiayaan, *mudharabah* berupa sertifikat rumah dan pembiayaan pada akad *musyarakah* ialah sertifikat tanah. Berdasarkan rukun dan syarat kedua belah pihak haruslah cakap hukum telah sah secara hukum BPRS Investama Mega Bakti Makassar dan nasabah untuk melanjutkan akad *musyarakah*.

Pihak BPRS Investama Mega Bakti Makassar bersama mitra menyiapkan modal untuk proyek yang akan dijalankan, peran nasabah dan BPRS pun memiliki pengelolaan masing-masing atas proyek tersebut, dengan ini pihak BPRS mempercayakan sepenuhnya pengelolaan diserahkan pada nasabah, namun pihak

¹¹⁶ Yudha, Nasabah pada Akad Pembiayaan *Musyarakah*, Wawancara, Tanggal 21 Agustus 2019

BPRS tetap melakukan evaluasi terhadap proyek tersebut. Hal ini dijelaskan oleh ibu

Anny Ariany Baso selaku analis bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar :

“setelah kita berikan modal yah untuk proyek tersebut lalu kita percayakan ke nasabah, yah sembari di evaluasi juga bagaimana perkembangannya supaya *nda macet juga pembiayaannya toh*”¹¹⁷

Wawancara tersebut menerangkan bahwa pihak BPRS mengadakan evaluasi terhadap proyek yang dijalankan untuk menghindari adanya kemacetan pembayaran.

Kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad), penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak, dan akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.¹¹⁸ Syarat ijab dan kabul di BPRS Investama Mega Bakti Makassar sudah sesuai dengan ditunjukkan adanya pengisian dan penandatanganan formulir pembiayaan *musyarakah*, seperti yang dikatakan oleh nasabah pembiayaan *musyarakah* bahwa :

“saya pakai dana 2 bulan *ji* untuk menutupi kekurangan yang ada, jadi langsung dikembalikan”¹¹⁹

¹¹⁷ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 17 Agustus 2019

¹¹⁸ Fatwa Dekan Syariah Nasional Nomor 8/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Dana yang diajukan oleh nasabah hanya dipakai selama 2 bulan saja dengan pengembalian pokok dan bagi hasil langsung diberikan kepada pihak BPRS investama Mega Bakti Makassar.

Ketiga, modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya, jika modal berbentuk aset, harus lebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra, para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan, pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan¹²⁰ BPRS Investama Mega Bakti Makassar merealisasikan modal dalam bentuk uang tunai, seperti yang dijelaskan oleh nasabah bahwa :

“saya ambil 130 juta, yah untuk terdesak saja, usaha perumahan BTN”¹²¹

Menurut wawancara tersebut sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi dalam penanaman modal berupa uang tunai Rp 130 juta di pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan dari pihak BPRS Investama Mega Bakti kepada nasabah, uang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan proyek pembangunan rumah BTN untuk pembiayaan *musyarakah*.

¹²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN/MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

¹²¹ Yudha, Nasabah Pada Akad Pembiayaan Musyarakah, Wawancara, Tanggal 21 Agustus 2019

Keempat, dalam ketentuan keuntungan pada pembiayaan *musyarakah* adalah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ¹²²

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e) Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Pada awal ijab kabul kedua belah pihak telah menyepakati perjanjian yang telah tertulis, dengan keuntungan yang telah ditetapkan di awal akad. Hal ini sesuai penuturan ibu Anny Ariany Basi selaku Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti, yang menyatakan bahwa :

“jumlah nilai bagi hasil kita tentukan diawal, jadi nasabah memperkirakan berapa keuntungan yang akan didapatkan lalu kita bagi dengan presentase bagi hasil yang ditetapkan”¹²³

¹²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 8/DSN/MUI-IV/2000 tentang *Pembiayaan Musyarakah*

¹²³ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, Wawancara, Tanggal 17 Agustus 2019

Hasil wawancara dengan analis bisnis BPRS Investama Mega Bakti menunjukkan bahwa pada ketentuan yang terealisasi menunjukkan adanya sifat *maishir* atau spekulasi mengenai keuntungan yang akan didapatkan yang semestinya keuntungan murni hanya dapat ditentukan ketika usaha telah berjalan. Penentuan jumlah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal juga tidak sesuai dengan fatwa DSN No 8 tahun 2000 tentang *musyawarah*.

D. Kendala BPRS Investama Mega Bakti

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti tentunya memiliki beberapa kendala dalam menjalankan system operasionalnya, hal ini dijelaskan oleh pihak BPRS Investama Mega Bakti yang menyatakan bahwa :

“yah sebenarnya itu sih kendalanya kurangnya sosialisasi ke masyarakat jadi masyarakat banyak yang belum paham dengan konsep pembiayaan syariah ini, terus kalau nasabah sudah ambil pembiayaan yah memang kita dikasikan laporan keuangan usahanya selama dia jalankan usahanya toh tapi itu diawalji sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan nah setelah itu nda adami dia kasiki, jadi kita juga susah toh untuk percaya ke nasabah selama ini kalo pembiayaan mereka macet baru dibilang usahanya ada yang rugi nah kita nda mungkin dong terima begitu saja, tiap bulan saja kita nda di kasi laporannya bagaimana kita bisa tau perkembangan usahanya toh.”¹²⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan analis bisnis di BPRS Investama Mega bakti kendala yang dialami oleh BPRS ialah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sekitar BPRS maupun pembiayaan syariah yang sebenarnya memudahkan mereka dalam peminjaman modal untuk melakukan usaha dan ketidakjelasan pelaporan keuangan dari pihak nasabah kepada pihak BPRS Investama

¹²⁴ Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar, *Wawancara*, Tanggal 7 Agustus 2019

Mega Bakti membuat transaksi pembiayaan tidak bisa berjalan dengan semestinya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku secara islami.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab IV, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Implementasi pembiayaan pada akad *mudharabah* pada segi akadnya telah terealisasi sesuai dengan landasan hukum syariah dengan kesepakatan bersama suka sama suka, namun ketentuan bagi hasil dan kerugian tidak sesuai dengan hukum syariah. BPRS Investama Mega Bakti Makassar tidak ikut menanggung kerugian tersebut.
2. Implementasi pembiayaan pada akad *musyarakah* telah sesuai dengan hukum islam dari segi akadnya, namun belum sepenuhnya menerapkan konsep syariah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, yakni:
 - a. Jumlah taksiran nilai atas keuntungan yang didapatkan oleh nasabah telah ditetapkan di awal.
 - b. Kerugian yang terjadi tidak ditanggung secara bersama melainkan di tanggung oleh nasabah secara menyeluruh.
 - c. Sifat *maishir*, *gharar*, dan *riba* masih tertanam di dalamnya.

B. Implikasi

Sebaiknya BPRS Investama Mega Bakti melakukan sosialisasi secara rinci mengenai pembiayaan yang sesuai dengan syariah dengan akad yang ada dalam produk BPRS Investama Mega bakti kepada masyarakat secara umum agar jumlah nasabah dapat meningkat dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal

dengan cara yang syariah tanpa terlibat dalam transaksi *riba*/bunga, *maishir*, dan *gharar*.

BPRS Investama Mega Bakti harus teliti dalam mengambil keputusan pembiayaan pada calon nasabahnya, agar tidak terjadi penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah serta adanya pantauan usaha yang dijalankan oleh nasabah agar tingkat kepercayaan dalam relasi ini dapat terbangun dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud Sulaiman bin al Asy'ats bin Basyir bin syadad, Musnad Abu dawud, Juz III. Cet: I; Beirut: al-Maktabatul Ashrih.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teori ke Praktik*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. "*Fiqh Madzhab al-Arba;ah*" Juz III. Beirut: Dar al-Qalam, tt.
- Anang Kusuma, *Opini Masyarakat Tentang Bank Syariah, Media Online* (19 Desember 2016) <http://www.kompasiana.com>(Di akses tanggal 1 Maret 2019).
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. Jawa Barat. 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan: Edisi Revisi V*. Jakarta. Rineka Cipta. 2002.
- Arsip Dokumen BPRS Investama Mega Bakti, (Di akses tanggal 8 Juli 2019).
- Arvi Sri Utami, "Implementasi dan Kontribusi Pembiayaan *Musyarakah* Untuk Peningkatan Usaha Nasabah di *Baitul Maal Wa Tamwil* Berkah Trenggalek", *Skripsi* (Tulung Agung: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulung Agung, 2017), h. 129. [Repo.iain-tulungagung.ac.id](http://repo.iain-tulungagung.ac.id) (Di akses tanggal 01 Maret 2019)
- Ascaraya. *Bank dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press. Jakarta. 2012.
- Bambang Waluyo, "Implementasi *Mudharabah* pada Pembiayaan di Bank Syariah". *Jurnal; Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (Juli-Desember 2016), h. 193
- BPRS Investama Mega Bakti, "Produk Kami", <http://bprsinvestama.com/>, (Di akses tanggal 2 Agustus 2019).
- BPRS Investama Mega Bakti,"Sejarah", <http://bprinvestama.com/statis-8-sejarah.html> (Di akses tanggal 2 Agustus 2019).

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Prenada Media Grup. Jakarta.
- David Hizkia Tobing dkk. *Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Denpasar. 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Syamil Qur'an. Bandung.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 7/DSN-MUI-IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*.
- Fatwa DSN No. 7/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Fatwa DSN No. 8/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Musyarakah*
- Firdaus, Muhammad. *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*. Renaisan. Jakarta. 2005.
- Hariri, Mukhwan "Pelaksana Produk Pembiayaan Modal Usaha *Advertising* Melalui Akad *Musyarakah* di BPRS Al-Ma'soem Rancaekek Bandung", *Skripsi*, (Bandung: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2013), h. 8.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2012.
- Hasil Wawancara Anny Ariany Baso, Analis Bisnis BPRS Investama Mega Bakti Makassar. Tanggal 7 Agustus 2019.
- Hasil Wawancara Hadelyn. Nasabah BPRS Investama Mega Bakti pada Akad *Mudharabah*. Tanggal 01 Oktober 2019.
- Hasil Wawancara Yudha. Nasabah pada Akad Pembiayaan *Musyarakah*. Tanggal 21 Agustus 2019.
- Hasil Wawancara Yulianus Sumule. Manager Bisnia BPRS Investama Mega Bakti. Tanggal 24 Juli 2019.
- Hermansyah dan Sandi Rizki Febriadi, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Pasal 1338 KUH Perdata", *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2, (2017), h. 433.
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Musnad Ibnu Majah*, Juz II, (Cet: I; Arab).

- Ibrahim Fajri dkk, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyusunan Perjanjian Sektor Penjamin Syariah", *Jurnal Yustisi*, Vol. 4, N0. 2, (September 2017). h. 28.
- Ifham, Ahmad. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. Jakarta. 2011.
- Lawrence, Neuman W. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 7*, Penerjemah: Edina T. Sofia. PT Indeks. Jakarta. 2013.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No. 7 tahun 2000*.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Kencana. Jakarta. 2014.
- Mas'adi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- Moelong. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 1999
- Muhammad Khoirul Ridwan, "Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Yogyakarta ", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), h. 100. digilib.uin-suka.ac.id (Di akses tanggal 01 Maret 2019)
- Muhammad. "Manajemen Bank Syariah". Yogyakarta. UPP AMP. 2002.
- Muhammad. "Teknik Bagi Hasil Keuntungan pad Bank Syariah". UII Press. Yogyakarta. 2004.
- Mulyana, Dedy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2004.
- Mursal. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah : Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, h. 79.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Ekonomi Islam*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Nazir, Mohammad. *Merode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.

- Rohmi, Putri Kamilatur. "Implementasi Akad *Musyarakah Mutanaqishah* pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang". *Jurnal Iqtishoduna* 5, no. 1 (2015).
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfaceta. Bandung. 2009.
- Suhendi, Hendi. "*Fiqh Muamalah*". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2014.
- Sutopo, Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. *Terampil Mengolah Data Kealitatif dengan NVIVO*. Prenada Media Group. Jakarta. 2010.
- Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. 2002.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta. 2016.
- , *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta. 2009.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus*. Rajawali Pres. Jakarta. 2002.



Manuskrip Wawancara

**IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN
MUSYARAKAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT
SYARIAH**

(Studi BPRS Investama Mega Bakti Makassar)

A. Manager BPRS/ Analis Bisnis BPRS

1. Bagaimana sejarah berdirinya BPRS Investama Mega Bakti Makassar ?
2. Apa visi, misin dan tujuan BPRS Investama Mega Bakti Makassar ?
3. Apa saja produk-produk BPRS Investama Mega Bakti Makassar ?
4. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ?
5. Berapakah jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ?
6. Persyaratan apa yang harus dipenuhi *Mudharib* ?
7. Bagaimana cara BPRS Investama Mega Bakti Makassar menentukan *Mudharib* memperoleh pembiayaan ?
8. Apa saja standar kelayakan nasabah untuk pembiayaan ?
9. Berapa jangka waktu pembiayaan *Mudharabah* maupun *Musyarakah* ?
10. Bagaiman cara menentukan bagi hasil pembiayaan ?
11. Bagaimana mekanisme bagi hasil ?

12. Bagaimana proses pengambilan modal dari nasabah ke BPRS Investama Mega Bakti Makassar ?
13. Apa hak dan kewajiban nasabah dan BPRS Investama Mega Bakti Makassar dalam pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ?
14. Apa kendala yang dialami oleh BPRS Investama Mega Bakti Makassar dalam penanganan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ?
15. Apakah ada pengawasan terhadap usaha nasabah ?
16. Apakah ada laporan keuangan dari anggota pembiayaan terkait usaha ?
17. Apakah yang dilakukan Bank ketika nasabah mengalami kerugian ?

B. Nasabah BPRS

1. Apakah anda melakukan pembiayaan di BPRS Investama Mega Bakti Makassar ?
2. Untuk apa melakukan pembiayaan di BPRS Investama Mega Bakti Makassar?
3. Apakah keuntungan yang anda dapatkan dengan adanya pembiayaan tersebut?
4. Apakah BPRS Investama Mega Bakti Makassar memberikan syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan ?
5. Apakah ada jaminan yang digunakan untuk pembiayaan ? Apa ?
6. Apakah besarnya bagi hasil ditentukan pada saat akad ?

7. Apakah pihak BPRS Investama Mega Bakti Makassar melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha yang dijalankan ? Bagaimana pengawasannya ?
8. Apakah tidak ada denda bagi yang terlambat membayar ?
9. Apakah pembiayaan tersebut sudah sesuai syariah ?



Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. BPRS Investama Mega Bakti Makassar

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, stylized green emblem. It features a central shield-like shape with a smaller shield inside, containing the year '1965'. The emblem is flanked by two vertical bars and has a pointed top and bottom.

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Yulianus Sumule
Manager Pembiayaan di BPRS Investama Mega Bakti Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Anny Ariany Baso

Analisis Bisnis di BPRS Investama Mega Bakti

Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Hadelyn
Nasabah Akad Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Yudha
Nasabah Akad Pembiayaan *Musyarakah*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

f



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dyah Fitrokhtul Insani, lahir pada tanggal 12 Maret 1995 di Kota Tegal Jawa Tengah, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Ahmad Zamroni dan Ibu Yuli Purwiyani. Tahun 2000 memulai pendidikan di RA Purwanida II Slawi Kulon, kemudian di tahun 2001 melanjutkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 43 Parepare, kemudian pada tahun 2007 melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2013. Tahun 2014 lanjut ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Penulis menyelesaikan studi pada tahun 2019. Pada tahun 2018 bulan Maret sampai Mei, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Bone Kecamatan Amali Desa Ajanglaleng dan selama kuliah pernah aktif menjadi kader pada Forum Kajian Ekonomi Syariah (Forkeis) serta HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Ekonomi Islam.